

SEJARAH KOTA SAMARINDA

Tim Penulis :

- 1. Moh. Nur Ars**
- 2. Yunus Rasyid**
- 3. Hasyim Achmad**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1986

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan



SEJARAH KOTA SAMARINDA

Tim Penulis :

1. Moh. Nur Ars
2. Yunus Rasyid
3. Hasyim Achmad



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1986



Penyunting

Mukhlis



SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan

untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juli 1986

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123.

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal "Sejarah Kota" di seluruh Indonesia.

Pengertian "Sejarah Kota" dalam hal ini ialah sejarah pertumbuhan dan perkembangan kota-kota besar di Indonesia ditinjau dari segi politik, ekonomi dan sosial-budaya pada periode tertentu (1950 – 1979).

Dengan tersusunnya "Sejarah Kota" tiap-tiap daerah di wilayah Indonesia, diharapkan masyarakat luas akan memperoleh bahan-bahan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Adanya informasi yang disajikan kepada masyarakat dalam bentuk tulisan sejarah akan membuka kemungkinan tercapainya suasana dinamis serta dapat memancing partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha pembangunan.

Dalam kerangka yang lebih luas, penulisan "Sejarah Kota-kota Besar" akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa ke-

bangsaan terutama bagi generasi muda demi kesinambungan sejarah dan pembinaan bangsa.

Jakarta, Juli 1986
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional,

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYA- AN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Gambaran Geografis Kota Samarinda	1
1.2 Lintasan Sejarah Kota Samarinda	2
1.3 Masa VOC (sampai dengan 1799)	4
1.4 Masa Hindia Belanda (1800 – 1900)	6
1.5 Awal Abad ke-20 Sampai dengan 1950 ..	15
1.6 Masa Pendudukan Jepang	16
1.7 Penduduk dan Mobilitas Kehidupan Kota Samarinda	18
1.7.1 Penyebaran dan Komposisi Penduduk ...	19
1.7.2 Mobilitas	22
Bab II. Kehidupan Politik dan Pemerintahan Kota	27
2.1 Gerakan Politik di Awal Kemerdekaan RI.	27
2.2 Kehidupan Politik dan Pemerintahan Se- sudah Tahun 1950	35

2.3	Pemekaran Wilayah Administratif Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda	37
2.4	Kekuatan Sosial Politik	40
Bab III	Kehidupan Sosial Budaya	45
3.1	Agama	
3.2	Pendidikan	48
3.3	Kebudayaan	53
Bab IV	Peranan Ekonomi Kota Samarinda	56
4.1	Peranan Ekonomi Kota	56
4.2	Pusat Kegiatan Ekonomi Daerah	56
4.3	Sebagai Ibukota Federasi Kalimantan Timur	58
4.4	Sebagai Ibukota Daerah Istimewa Kutai	59
4.5	Sebagai Ibukota Propinsi dan Ibukota Kotamadya	60
4.6	Pasar dan Lain-lain	61
4.7	Pertokoan	63
4.8	Pelabuhan dan Pergudangan	65
4.9	Perbankan	71
4.10	Terminal	72
4.11	Transportasi dan Komunikasi	73
4.11.1	Lalu-lintas Angkutan Jalan Raya	74
4.11.2	Lalu-lintas Angkutan Sungai, Danau dan Ferry	75
	LAMPIRAN	86
	DAFTAR PUSTAKA	89
	FOTO	92

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Geografis Kota Samarinda

Secara astronomi wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda terletak antara 2' 25" LS sampai dengan 1° 13' 15" LS, dan antara 117° BT sampai dengan 117 45' BT. Letak geografis daerah ini berada di sepanjang Sungai Mahakam melebar ke daratan antara 10 sampai 16 km, dengan batas-batas: (1) di sebelah utara dengan wilayah Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Tenggarong, dan Kabupaten Kutai (2) di sebelah selatan dengan Selat Makassar dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat ii Balikpapan (3) di sebelah timur dengan Kabupaten Kutai dan Selat Makassar (4) di sebelah barat dengan wilayah Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, serta wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan.

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda terdiri atas daerah perkotaan dan daerah pedesaan yang seluruhnya meliputi luas 2.727 km². Bagian utara dari wilayah tersebut merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 10 sampai 40 m, sedangkan di bagian timur terdapat dataran tinggi sekitar 10 m yang membujur dari utara ke selatan, dipisahkan oleh Sungai Mahakam. Ketinggian mencapai puncaknya di Bukit Selili dengan ketinggian 100 meter. Di sebelah selatan Sungai Mahakam terdapat Gunung Segiri dengan ketinggian 120 meter. Di bagian

utara Sungai Mahakam dataran tinggi terus berlanjut sepanjang kurang-lebih lima kilometer dengan ketinggian antara 10 – 40 meter. Hamparan dataran rendah hanya terdapat di sebelah selatan, dengan ketinggian kurang-lebih dua meter dari permukaan laut.

Berdasarkan atas tata guna tanah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda terbagi menjadi lima, yakni tanah untuk bangunan seluas 4.500 ha, tanah untuk pertanian seluas 40.500 ha, tanah untuk perkebunan seluas 9.500 ha, bukit pegunungan seluas 199.840 ha, dan sungai/rawa seluas 4.010 ha.

Jenis tanah yang terdapat di wilayah ini adalah organosol humus, terutama terdapat di lokasi hutan yang baru dibuka dan tanah podzolik merah kuning, yang terdapat di dataran tinggi, daerah perbukitan, dan di dataran rendah, seperti di daerah pantai dan tepi sungai yang terdapat jenis tanah alluvial.

Curah hujan rata-rata setiap tahun mencapai lebih dari 2.000 mm. Hal ini terjadi karena wilayah Kotamadya Samarinda letaknya berdekatan dengan garis katulistiwa, lagi pula sebagian besar daerah ini masih tertutup hutan tropika basah. Kelembaban udara berkisar antara 76 – 84%, dengan temperatur minimal 20°C dan maksimal 28°C.

1.2 Lintasan Sejarah Kota Samarinda

Kota Samarinda tumbuh dari tiga kampung pemukiman suku Kutai puak Melanti yaitu Kampung Mangkupalas, Karamumus dan Karang Asam. Ketiga kampung ini bergabung dengan Kelurahan Ulu Dusun di Kutai Lama di bawah pimpinan Ngebahi Ulu. Sejak abad ke-14 ketiga kampung itu memperoleh pengaruh yang sangat kuat dari Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan, akan tetapi sesudah kekalahan Kerajaan Makassar itu tahun 1667 atau sesudah Perjanjian Bungaya (1662) pengaruh Makasar berangsur-angsur berkurang di Kalimantan Timur.

Pada tahun 1668 orang Bugis dari Sulawesi Selatan mulai bermukim di Kutai. Pada permulaan abad ke-18 berdatangan

pendatang baru Bugis Wajo di bawah pimpinan La Mohang Daeng Mangkona, pengikut La Maddukelleng putra Arung Paneki dari daerah Wajo. La Mohang menghadap Raja Kutai Lama Ali Pangeran Dipati Anom Panji Mendapa Ing Martapura (Marhum Pamarangan 1730 – 1732) untuk mohon izin agar mereka diperbolehkan berdiam di wilayah Kerajaan Kutai. Raja memberi izin mereka berdiam di Kutai tetapi harus mencari pemukiman di sekitar Sungai Mahakam, di antara dua dataran rendah. Orang-orang Wajo akhirnya menemukan tempat itu dan menamakannya "Samarinda" yang terjadi dari dua kata, "sama" dan "rendah".

Setelah Pemerintah Kolonial Belanda mematahkan perlawanan Sultan Salehuddin dari Kerajaan Kutai tahun 1844, gubernemen Belanda menempatkan Asisten Residen H. von De Wall ke Samarinda Kota, yakni sesudah tempat itu dijadikan daerah yang langsung berada di bawah perintah gubernemen atau *Vierkante paal* tahun 1896. Selain menjadi pusat pemerintahan Kalimantan Timur, gubernemen Belanda juga menjadikan Samarinda sebagai kota pelabuhan daerah Kutai dan sekitarnya.

Pada zaman NICA (1946 – 1949) Samarinda merangkap menjadi tiga ibukota pemerintahan yaitu pemerintahan keresidenan, pemerintahan Federasi Kalimantan Timur dan pemerintahan kawedanaan. Sebelas tahun sesudah proklamasi kemerdekaan, yaitu Januari 1957, Kalimantan Timur memperoleh status propinsi dan Samarinda terpilih menjadi ibukotanya. Pada tahun 1960 Samarinda menjadi kotapraja dan tahun 1969 dijadikan kotamadya.

Beberapa faktor yang menyebabkan Kota Samarinda berkembang dengan pesat antara lain ialah letaknya yang strategis, kekayaan sumber alamnya baik di daerah pedalaman maupun di sekitarnya terutama di sektor perkayuan, minyak dan gas bumi, sehingga Samarinda menjadi kota penghasil devisa terbesar kedua sesudah Medan, Sumatra Utara.

Samarinda yang menjadi ibu kota Propinsi Kalimantan Timur dan ibu kota Kotamadya Samarinda didiami bermacam-

macam suku bangsa. Mereka melakukan kegiatan pada pelbagai aspek kehidupan yang akan diuraikan dalam sejarah kota ini.

1.3 Masa VOC (sampai dengan 1799)

Pada zaman VOC orang Belanda telah mencoba mengadakan perhubungan dengan Kutai dan Pasir. Kontak pertama antara Kutai dan Pasir dengan VOC terjadi pada tahun 1634. Selain urusan perdagangan, Kompeni juga mengajak Kutai dan Pasir mengadakan monopoli perdagangan dan mengusir pedagang-pedagang Makasar dan Jawa dari kedua kerajaan itu (J. Eisenberger 1936:9).

Usaha Kompeni mengajak Kutai dan Pasir untuk mengadakan monopoli perdagangan ternyata tidak membawa hasil karena Kerajaan Gowa sudah sejak tahun 1620 mempunyai hubungan baik dengan raja-raja Kutai.

Pada tahun 1635 di bawah pimpinan Gerrit Thomassen untuk kedua kalinya Belanda mengirim misi perdagangannya. Di Kutai, Gerrit Thomassen bertemu dengan Sultan Sinom Panji Mendapa Ing Martapura. Mereka membicarakan monopoli dagang mengingat kewajiban sultan Kutai harus membayar upeti kepada raja Banjarmasin (J. Eisenberger 1936;7).

Pembicaraan G. Thomassen Pool yang sengaja membuat raja Kutai dan Pasir tidak senang dan bertujuan mengadudomba raja-raja di Kalimantan Timur dan Banjarmasin, membuat misi perdagangan VOC gagal. Sementara itu Kompeni belum mampu menyaingi pengaruh Gowa dan Mataram di Selat Makassar, upaya untuk "menjinakkan" raja Kutai dan Pasir kembali diusahakan.

Pada tahun 1671, empat tahun sesudah Perjanjian Bongaya, Kompeni mengirim lagi misi perdagangan yang dipimpin oleh Paulus de Beck dengan menumpang secara khusus kapal *Chialoup de Noorman*. Sekali lagi Paulus de Beck bertemu dengan Sultan Sinom Panji Mendapa Ing Martapura, tetapi tidak berhasil mengadakan hubungan dagang. (J. Eisenberger 1936:9).

Selain usaha mengadakan hubungan langsung dengan Kutai dan Pasir, Kompeni berusaha juga melemahkan perdagangan antara Kutai dan Pasir dengan Makasar dan Jawa di perairan Selat Makassar.

Walaupun beberapa misi perdagangannya ke Kalimantan belum membawa hasil, Kompeni tetap melanjutkan usaha-usahanya melalui surat-menyurat ditujukan kepada raja-raja Kutai dan Pasir. Usaha ini agaknya membawa hasil, karena pada tahun-tahun berikutnya, banyak barang-barang dari Pasir dan Kutai ditawarkan ke Makassar. (Eisenberger 1936:9).

Pengangkutan barang-barang dagangan itu dilakukan oleh pedagang-pedagang Bugis pengikut Aru Palaka yang menjadi sekutu Kompeni, yang sejak 1668 mulai bermukim di Kutai sekitar Samarinda Seberang.

Ketika perantau-perantau Bugis Wajo bermukim di Pasir dan di Kutai, terutama di Samarinda Seberang, perdagangan Kutai dengan Kompeni mulai terputus. Terjadilah persaingan antara pelaut-pelaut Bugis Wajo dengan Bugis Bone yang didukung oleh Kompeni.

Kemacetan Hubungan perdagangan Kompeni di Selat Makassar ini diakui pula di Sulawesi Selatan.

La Maddukelleng membentuk armada laut yang oleh Lontara Suku'na Wajo disebut gora' bajak laut yang oleh Asisten van Boen L.A. Emanuel dinyatakan sebagai "seorang bajak laut" yang amat ditakuti yang dengan 40 perahu layar selama beberapa tahun di beberapa tempat membuat tidak aman di lautan ..."

Pada tahun 1736, setelah 10 tahun lamanya La Maddukelleng memerintah di Pasir, datanglah suruhan Arung Matowa Wajo, La Salewangeng To Tenrirua, bernama La Delle menghadap Sultan Pasir. Dalam suratnya Arung Matowa meminta La Maddukelleng kembali ke Wajo, guna memerdekakan Wajo dari dominasi Bone dan VOC" (A.Z. Abidin SH, 1980:40)

Pada tanggal 6 Nopember 1736 rakyat mengangkat La Maddukelleng menjadi raja Wajo sampai tahun 1754, namun de-

mikian armadanya masih menguasai Selat Makassar dan pengikut-pengikutnya masih bermukim di Pasir dan Kutai terutama di Samarinda Seberang.

Untuk mengatasi kemacetan perhubungan dagang ini, Kompeni mengirimkan pula misi dagangnya yang dipimpin oleh Van der Heyden ke Pasir dan ke Kutai. Dalam laporannya kepada pembesar VOC, dijelaskan bahwa kedua kerajaan di Kalimantan Timur itu baik untuk teman berdagang, tetapi sangat berbahaya bagi orang Eropa untuk berdiam di daerah itu. Berdasarkan keterangan misi Van der Heyden itulah kesulitan hubungan dagang antara Kompeni dengan Kutai tetap tidak teratasi.

Sesudah misi perdagangan 1747 yang dipimpin oleh Van der Heyden, Kompeni tidak lagi mengirimkan kapal-kapal dagangnya ke Kutai dan Pasir. Sampai jatuhnya tahun 1899, VOC tidak pernah berhasil mengadakan hubungan dagang yang menguntungkan di kawasan ini. Demikian pula tidak ada perwakilan dagang atau pembesar VOC yang tinggal menetap di kedua kerajaan itu.

Dengan demikian mudah dimengerti jika dalam sejarah VOC di Kalimantan tidak terdapat tulisan-tulisan mengenai keadaan Samarinda Kota maupun Samarinda Seberang, karena kemungkinan pelabuhan yang terkenal pada zaman VOC bukan Samarinda, tetapi Kutai Lama yang juga menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Kutai.

1.4 , Masa Hindia Belanda (1800 – 1900)

Ketika VOC jatuh (1799), kekuasaan beralih ke tangan Gubernur Hindia Belanda. Akan tetapi sampai tahun 1800 Gubernur Belanda belum berhubungan langsung dengan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur. Sampai pada zaman kekuasaan Inggris di Indonesia tahun 1811 – 1816 pengaruh asing masih belum sampai ke daerah ini. Baru setelah komisaris jenderal Belanda menerima penyerahan pemerintahan di Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1816 dari Inggris, Gubernur Belanda me-

mantapkan kekuasaannya ke seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Timur.

Pada tahun 1825 Gubernemen Belanda di Betawi (Jakarta) mengirim utusannya George Muller untuk mengadakan perjanjian persahabatan dengan Sultan Salehuddin dari Kerajaan Kutai Kertanegara di Tenggarong. Setelah berhasil, ia bermaksud pula mengadakan perjalanan dari Samarinda ke Pontianak lewat Sungai Mahakam dan Sungai Kapuas. Akan tetapi di tengah perjalanan dia terbunuh dekat Marakaman. (Carl Bock 1887. LIV; J. Eisenberger 1936 1936:20).

Seorang petualang dan penyelidik berkebangsaan Inggris bernama John Dalton melakukan perjalanan keliling Kutai, melaporkan bahwa Salehuddin terlibat dalam pembunuhan George Muller itu. Namun demikian Gubernemen Belanda tidak dapat melakukan pembalasan karena pada saat yang sama, Belanda menghadapi perang di Ponorogo, Jawa Tengah, dan perlawanan Imam Bonjol di Sumatra Barat.

Pada tahun 1844 suatu ekspedisi Inggris terdiri dua buah kapal, *Young Queen* dengan Kapitan Hart dan kapal perusak *Anna* dengan Kapitan Lewis. Ekspedisi yang dipimpin oleh James Erskine Murray itu mencoba menanam pengaruhnya di Kerajaan Kutai. Dengan perantaraan juru bicaranya seorang Benggala, ia mengumumkan kepada penduduk Samarinda dengan menyebut dirinya sebagai "Tuan Besar Raja Maris". Dengan tidak menunggu izin Sultan Kutai ia berlayar dengan kedua kapalnya untuk mudik ke Tenggarong. Kepada sultan ia menyatakan kemauannya meminta tanah di Kota Tenggarong. Di atas tanah itu ia bermaksud mendirikan kantor dan monopoli perdagangan. Sultan Salehuddin mengizinkannya mendirikan perwakilan dagang di Samarinda dengan alasan bahwa tempat itu memang disiapkan sebagai kota dagang. Selanjutnya Murray memaksakan kehendaknya dengan berkirim surat yang isinya *pertama* supaya menyetujui permintaannya, dan *kedua* mengizinkannya berlayar ke pedalaman dengan jaminan sultan harus mengirim Pangeran Mangkubumi, Sultan Muda, Pangeran

Dipati dan Uwa Nyamojang ke kapal disertai ancaman apabila dalam tempo setengah jam sultan tidak mengirimkan keempat orang itu, Murray akan mengambil cara lain.

Setelah lewat setengah jam sultan tidak mengirimkan jaminan yang diminta oleh Murray, kraton sultan ditembak dengan meriam. Karena tindakan Murray itu terjadilah pertempuran, yang mengakibatkan pemimpin ekspedisi Inggris itu dengan beberapa orang anak buahnya tewas. Sisa-sisa dari anak buahnya melarikan diri ke Makassar dengan sekoci kapal Belgi yang kandas di muara Sungai Mahakam. Kapal Belgi yang kandas itu disangka kapal Murray oleh prajurit Kutai yang mengejanya sampai ke Muara. Begitu marahnya mereka itu sehingga seluruh isi kapal dirampas.

Setelah menerima berita peristiwa J.E. Murray, Pemerintah Inggris merencanakan mengirimkan angkatan laut untuk menyerang Kutai. Pemerintah Belanda memprotes rencana Inggris itu, karena berdasarkan Konvensi London 1814 Kalimantan Timur termasuk wilayah Gubernemen Belanda. Pemerintah Belanda berjanji akan menyelesaikan kasus Murray.

Gubernemen Belanda segera memerintahkan angkatan lautnya di Makassar menuju ke Kutai. Armadanya terdiri atas S'Kuner Egmond, Zephijr, Janus dan kapal perusak Arend dipimpin oleh Letnan (laut) I 't Hooft. Kekuatan angkatan laut Belanda selain kapal perang juga dilengkapi dengan tiga buah berkas *kruisboot* nomor 18 dan 74 serdadu angkatan laut, serta 140 orang serdadu angkatan darat.

Pada tanggal 29 Maret 1844 'Hooft tiba di Tjirotto, suatu tempat di hilir Samarinda. Sebandar Samarinda Daeng Soette, de Glarang (Poea Adoe) dan Daeng Matola datang menemui Letnan 't Hooft. Sebandar Daeng Soette diminta 't Hooft supaya tetap bersama-sama dia di kapal menuju Samarinda, sedang yang lain lebih dahulu berangkat.

Tanggal 1 April 1844 angkatan laut Belanda berlabuh satu mil di hilir Samarinda. Letnan 't Hooft meminta supaya sultan

datang menemuinya di Samarinda. Karena Sultan Salehuddin tidak bersedia memenuhi permintaan 't Hooft, maka angkatan laut Belanda itu mudik ke Tenggarong. Pada tanggal 6 April 1844 mereka tiba di Tenggarong, tetapi istana telah dikosongkan. Sultan dengan keluarga dan para pembesar telah mengungsi ke Kota Bangun. Letnan 't Hooft mengirim utusan untuk memeriksa keadaan kota.

Keesokan harinya pukul 05.30 diperintahkannya kepada Letnan (laut) I Cijver komandan Z.M. Schoener Zephijr mem bakar Kota Tenggarong. Pukul 17.00 lebih kurang- 500 a 600 buah rumah dan sebuah mesjid yang indah hangus terbakar. Angkatan laut Belanda kemudian kembali ke Samarinda. Gelarang Pua Ado segera menemui 't Hooft di kapal. Ia dan anak buahnya dituduh oleh 't Hooft bersekongkol dengan prajurit Kutai membajak dan merampok barang-barang kapal *Belgi De Charles*. Meskipun Pua Ado menyangkal dengan keras, tetapi 't Hooft tetap dengan keputusannya. Pua Ado dan anak buahnya dihukum; *pertama* harus mengembalikan semua barang-barang kapal *De Charles* yang dirampas anak buah Pua Ado, *kedua* harus membayar denda sebanyak 60.000 real mata uang perak dalam tempo 24 jam.

Dua hari kemudian, yakni pada 10 April 1844, Pua Ado datang menemui Letnan 't Hooft dengan membawa uang denda 4000 rupiah. Letnan 't Hooft bersedia menerimanya dengan syarat sisanya harus dibayar dalam tempo lima tahun dan sebagai jaminannya ia minta tiga orang sandera keluarga Pua Ado. Pada tanggal 11 April 1844 Pua Ado terpaksa membawa menantunya Haji Baran Achmad dan Lacu Pua Bassih sepupunya sebagai jaminan. Sesudah menerima jaminan itu 't Hooft dengan angkatan lautnya berangkat meninggalkan Samarinda. Tanggal 21 April 1844 mereka tiba di Makassar.

Lima bulan kemudian, yakni pada tanggal 26 September 1844, A.L. Weddik komisariss gubernemen untuk Pulau Kalimantan, tiba di Samarinda dengan dua buah kapal perang. Permintannya dipenuhi oleh Sultan Salehuddin, dan pada tanggal

11 Oktober 1844 diadakan suatu perjanjian antara Sultan Saleh-uddin dari Kerajaan Kutai Kertanegara dengan Arnoldus Laurens Weddik sebagai wakil Gubernemen Belanda yang isinya antara lain Kerajaan Kutai Kertanegara mengakui kedaulatan Gubernemen Belanda. Dengan ditandatangani kontrak tersebut, berakhirlah kemerdekaan Kerajaan Kutai Kertanegara sebagai kerajaan yang beraulat. (Karl Bock 1887; LXI – LXV).

Sebagai kelanjutan perjanjian itu Gubernemen Belanda menempatkan seorang pegawainya yang berpangkat asisten residen bernama Von De Wall di Pelarang (kurang lebih delapan mil di hilir Samarinda). Von de Wall menamakan Kota Samarinda dengan sebutan "Samarindah".

"Samarindah" terletak di sebelah "kanan mudik" Sungai Mahakam. Penduduknya 5000 jiwa suku bangsa, yang terbanyak ialah Bugis Wajo dari Sulawesi Selatan. Rumah kediaman mereka memakai tiang berjumlah 150 buah. Selain itu juga terdapat 200 buah rumah sakit di tepi Sungai Mahakam. Di kota itu berdiam juga dua orang Cina, dua keluarga bangsa Arab dan beberapa orang suku bangsa Jawa.

Di seberang kota di sebelah "kiri mudik" Sungai Mahakam terdapat barisan bukit-bukit yang tingginya 300 sampai 400 kaki. Tanah di belakang perkampungan dijadikan ladang padi. Kebanyakan penduduknya berdagang. (A.L. Weddik 1849: 85, 86)

Demikianlah tata fisik Kota Samarinda menurut A.L. Weddik, gubernur Kalimantan, berdasarkan laporan Von de Wall asisten-residen Kalimantan Timur pada tahun 1846. Dari tulisan itu bagian kota yang ramai ialah Samarinda Seberang, sedangkan Samarinda Kota masih berupa pemukiman para peladang.

Tigapuluh tiga tahun kemudian, yakni pada tahun 1879, Carl Bock mendapat tugas dari gubernemen mengadakan perjalanan dari Samarinda ke Banjarmasin. Dari hasil penelitiannya, ia menulis tentang keadaan Kota Samarinda sebagai berikut.

Pagi tanggal 16 Juli 1879 kami tiba di Kutai dengan kapal laut dari Makasar. Dataran itu penuh dengan pohon-pohon nipah. Tengah

hari kami mudik Sungai Mahakam. Muara sungai bercabang tujuh-belas dan membentuk delta. Dari beberapa nakoda saya mendapat informasi, bahwa pelayaran di Sungai Mahakam adalah pelayaran yang paling sukar jika dibandingkan dengan pelayaran di tempat lain di Nusantara ini.

Pukul lima sore kami tiba di Pelarang tempat kedudukan tuan Seitz, asisten residen Kalimantan Timur. Kota kecil itu letaknya 40 mil dari muara Sungai Mahakam. Sebuah sekoci memberi tahu ke kapal, bahwa Tuan Seitz sedang bertugas ke Banjarmasin, karena itu kami mudik ke Samarinda delapan mil mudik Sungai Mahakam. Di Surabaya saya dititipi sepucuk surat untuk memperkenalkan saya dengan seorang Cina di Samarinda, supaya menerima saya sebagai tamu dan membantu memberikan informasi yang diperlukan. Empat hari saya menginap di rumah Cina itu.

Samarinda adalah kota pelabuhan untuk daerah Kutai. Kota itu kelihatan sangat miskin jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Nusantara yang pernah saya kunjungi. Demikian pula keadaan penduduknya. Penduduk kota berjumlah 10.000 orang, kebanyakan berasal dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Sebelah "kanan mudik" Sungai (Samarinda Kota) berdiam beratus-ratus pedagang Cina dan suku bangsa Melayu (suku bangsa Banjar). Jalan-jalan sempit dan berlumpur. Suasana kota sepi. Tidak jauh dari perumahan rakyat terdapat nisan-nisan kuburan yang tidak teratur. Rumah rakyat terbuat dari bambu beratapkan daun nipah. Ada juga rumah terbuat dari kayu berdinding papan, tetapi tidak seberapa jumlahnya. Semua rumah itu bertiang tinggi-tinggi, delapan sampai sepuluh kaki. Ada pula rumah rakit di tepi sungai Mahakam.

Alat transportasi mempergunakan perahu. Setiap rumah mempunyai sebuah perahu atau lebih. Rumah yang terbagus ialah rumah penginapan Sultan Kutai. Rumah itu bertingkat dua beratapkan seng. Pada tingkat kedua kelilingnya terdapat beranda yang panjang. Di samping "pesanggrahan" itu terdapat pula sebuah gardu penjagaan yang dipersenjatai dengan selusin meriam yang sudah berkarat dan mortir peninggalan abad yang lampau. Pertahanan itu juga merupakan pertahanan kota. Sultan Kutai beristana di Tenggarong. Jarang sekali menginap di Samarinda.

Sebuah lagi rumah yang agak bagus, yaitu rumah tempat kediaman wakil sultan Kutai untuk kota ini. Beliau bergelar Pangeran Ben-

dahara. Ia seorang pejabat kerajaan yang berwibawa. Beliau mempunyai kekuasaan besar, merangkap beberapa jabatan. Sebagai wakil sultan untuk Kota Samarinda, ia bertindak kadang-kadang selaku menteri luar negeri kerajaan, gubernur setempat, kepala polisi, dan lain-lain. Ia adalah seorang pejabat kerajaan yang sangat cerdas, keturunan Arab. Kedua rumah yang bagus ini terletak di Samarinda Seberang.

Di kota ini terdapat juga kepala pelabuhan yang berpangkat "sebandar", bertugas untuk memungut pajak barang keluar masuk pelabuhan. Cukai barang keluar 10% dan masuk pelabuhan ini disetor kepada raja. Hasil hutan terutama ialah rotan. Selain dari pada itu dikirim juga sarang burung, penyu dan teripang. Barang-barang yang diimpor ialah beras, garam, candu, gambir, kopi, minyak kelapa, minyak tanah, bermacam-macam kain katun dan lain-lain.

Pedagang-pedagang hasil hutan umumnya membeli secara kontan kepada pencari hasil hutan. Hasil setiap orang di kota sebagai pedagang. (Karl Bock 1887; 1, 2.).

Demikianlah data-data ditulis oleh Carl Bock tentang Kota Samarinda pada tahun 1879. Dari data-data itu dapat diambil suatu kesimpulan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Bahwa orang-orang Eropa dan asisten residen masih berdiam di Pelarang, delapan mil di hilir Kota Samarinda. Walaupun menurut Kolonial Verslag resminya asisten residen untuk *Af-deeling Kutai* dan Pesisir Timur Laut Kalimantan berkedudukan di Samarinda, bahkan Asisten residen S.W. Tromp pada tahun 1885 masih berdiam di Pelarang;
- 2) Samarinda mulai berkembang menjadi kota dagang. Menurut A.L. Weddik pada tahun 1846 pedagang Cina di Samarinda baru dua orang, tetapi pada tahun 1879 jumlah pedagang Cina itu sudah mencapai ratusan orang. Carl Bock juga sudah menyebutkan nama-nama komoditi impor dan ekspor yang dikirim melalui Pelabuhan Samarinda;
- 3) Penduduk Kota Samarinda tahun 1846 sebanyak 5000 jiwa, dan pada tahun 1879 telah berkembang menjadi 10.000 jiwa. Jadi dalam waktu 33 tahun jumlah penduduk telah bertambah 100% atau 3% setahun;

- 4) Tata fisik kota belum teratur, jalan-jalan sempit dan berlumpur. Rumah-rumah kebanyakan terbuat dari bambu beratapkan daun nipah;
- 5) Pemerintahan kota masih langsung di bawah pemerintah Kerajaan Kutai. Kesultanan menempatkan seorang wakilnya yang bertindak sebagai kepala pemerintahan setempat, berkedudukan di Samarinda Seberang.

Pertumbuhan Samarinda sebagai kota dagang semakin bertambah maju; antara lain disebabkan:

- 1) Semakin ramainya perdagangan antar pulau, karena mulai tahun 1876 Kutai (Samarinda) dimasukkan dalam hubungan pelayaran KPM (*Koninklijk Paketvaart Maatschappij*) yang mendapat subsidi dari pemerintah. Jalur pelayarannya adalah Makasar – Pare-pare – Samarinda. Dengan adanya jalur atau jadwal pelayaran tetap ini, pedagang-pedagang dengan mudah dapat mengadakan serta mengatur perjanjian dengan langganannya di kota-kota lain. Pada tahun 1882 jalur pelayaran KPM diperluas lagi melalui Singapura – Surabaya – Bawean – Banjarmasin – Pulau Laut – Samarinda. Dengan dibukanya jalur pelayaran baru ini pemasaran barang-barang perdagangan dari Samarinda dan sekitarnya semakin bertambah ramai. Pedagang-pedagang Samarinda bukan saja berhubungan dagang dengan pedagang antar pulau, tetapi juga dengan luar negeri seperti Singapura.
- 2) Mulai tahun 1859 terjadi perang Banjar melawan Kompeni. Rakyat Kalimantan Selatan terutama suku Banjar dan suku Dayak dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perang berlangsung sampai dengan tahun 1905. Karena kekejaman serdadu-serdadu Belanda, banyak orang Banjar di Kalimantan Selatan, baik pedagang maupun rakyat biasa berpindah ke Kalimantan Timur, terutama ke Kota Samarinda. Kebanyakan mereka bermukim di kampung-kampung antara Sungai Karamumus dan Sungai Karang Asam Besar. Di antara kampung-kampung orang Banjar ada yang terkenal dengan nama "Kampung HBS".

3) Dibukanya perusahaan bangsa Eropa terutama bangsa Belanda. Perusahaan-perusahaan itu umumnya bergerak di bidang pertambangan minyak tanah dan batu bara. Jumlah perusahaan Eropa yang mendapat izin, pencaharian dan pertambangan mulai tahun 1896 sampai 1899 di Kalimantan Timur sebanyak 18 buah, kebanyakan beroperasi di daerah Kutai dan Balikpapan. Tenaga kerja umumnya berasal dari Jawa. Mulai saat itu banyak orang Jawa juga bermukim di Samarinda, sehingga kampung yang dinamai Kampung Jawa. Orang-orang Bugis banyak juga yang bermukim di Samarinda Kota dan membuat kampung tersendiri dengan nama Kampung Bugis. Orang Cina yang jumlahnya sudah beratus-ratus orang itu membuat tempat pemukiman sendiri di sekitar pelabuhan. Mereka dikepalai oleh bangsanya sendiri yang disebut *khoy goan* (letnan Cina).

Dengan dibukanya perusahaan-perusahaan pertambangan bangsa Eropa, Samarinda Kota semakin ramai, banyak di antara mereka membuka kantor dan menetap di Kota Samarinda. Berdasarkan keadaan itu gubernemen mempertimbangkan akan lebih menguntungkan dan melancarkan roda pemerintahan apabila kedudukan asisten residen dipindahkan dari Pelarang ke Samarinda Kota dan bagian kota harus langsung berada di bawah pemerintahan gubernemen.

Dengan surat keputusan gubernur jenderal Hindia Belanda tanggal 16 Agustus 1896 nomor 7, Kota Samarinda ditetapkan sebagai ibukota *Afdeeling Kutai* dan Pesisir Timur Laut Pulau Kalimantan dengan batas-batas, di sebelah utara, timur laut dan barat dengan suatu daratan yang terletak sejajar dengan Sungai Mahakam (berjarak 500 meter dari sungai tersebut), di sebelah timur dengan Sungai Karamumus, di sebelah barat dengan Sungai Karang Asam Besar, dan di sebelah selatan dengan Sungai Mahakam.

Daerah ini langsung berada di bawah pemerintahan Gubernemen Belanda dengan nama *vierkante paal*, terlepas dari pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara, kecuali Samarinda Se-

berang yang tetap berada di bawah pemerintahan Kesultanan Kutai.

1.5. Awal Abad ke-20 Sampai Tahun 1950

Pada abad ke-20 Samarinda Kota mengalami perubahan baik administrasi pemerintahan maupun tata fisik kota. Karena perusahaan yang menanamkan modalnya sekitar Samarinda dan Balikpapan semakin banyak dan perdagangan semakin bertambah maju serta aparat Pemerintah Gubernur Belanda banyak memerlukan tempat pemukiman, maka dirasa perlu untuk memperluas *vierkante paal*.

Dalam jangka tiga tahun, yakni dari tahun 1900 – 1903 perusahaan bangsa Eropa yang mendapat izin mengadakan pencaharian dan penggalian di bidang pertambangan ada 18 buah, sehingga dari tahun 1896 sampai dengan tahun 1903 jumlah perusahaan asing di daerah ini menjadi 36 buah. (S.C. Knappert 1905: 73, 74).

Berdasarkan hal-hal tersebut, Gubernur Belanda merasa perlu untuk mengubah surat keputusan tanggal 16 Agustus 1896 nomor 7 tentang batas-batas ibukota Samarinda. Dengan surat keputusan gubernur jenderal tanggal 18 April 1903 nomor 25 ditetapkanlah perubahan batas-batas ibukota Samarinda, yakni di sebelah utara diperluas menjadi 800 m dari Sungai Mahakam, di sebelah timur diperpanjang sampai ke Sungai Kerbau, di sebelah barat tetap berbatasan dengan Sungai Karang Asam Besar, dan di sebelah selatan juga tetap berbatasan dengan Sungai Mahakam.

Sesudah Samarinda Kota dijadikan daerah yang langsung di bawah pemerintah gubernemen, jalan-jalan dalam kota diatur dengan sistem petak. Selokan-selokan pembuangan dibuat di pinggir jalan. Di tepi Sungai Mahakam dibuat jalan dari muara Sungai Karamumus sampai muara Sungai Karang Asam Besar. Di *Schoolweg* (sekarang Jalan Gajah Mada) dibangun rumah kediaman asisten residen, di sebelah kanannya dibangun kantor pengadilan, gedung *Eropeeshe Lagere School* (ELS), dan di belaa-

kang rumah kediaman asisten residen dibangun lapangan. Berdekatan dengan lapangan tersebut didirikan tangsi, rumah-rumah perwira, penjara dan kuburan Belanda (*kerkhof*).

1.6 Masa Pendudukan Jepang

Setelah Balikpapan diduduki tentara Jepang pada akhir Januari 1942, sekitar tanggal 3 Pebruari 1942 mereka tiba pula di Samarinda tanpa perlawanan dari tentara Belanda (KNIL). Tentara Belanda mundur ke Tenggarong, Kota Bangun terus ke Samarinda II sampai di daratan Melak. Setelah Belanda menyerah tanggal 20 Maret 1942, tentara pendudukan Jepang mulai mengafur pemerintahan. Kalimantan Timur termasuk Kota Samarinda berada di bawah pemerintahan *kaigun* atau angkatan laut. Pembesar tertinggi untuk Pemerintah Kalimantan Timur berkedudukan di Balikpapan. Pegawai sipil di Kota Samarinda yang berpangkat *kanrikan* Samarinda Seberang ditempatkan seorang *guncho* (asisten-wedana). *Guncho* sebagai kepala distrik dibantu oleh *fuku guncho* sebagai *onderdistrictshoofd*. Di kampung-kampung dikepalai oleh *jumpe-jumpe* bangsa Indonesia. *Kempetai* ini mempunyai kekuasaan besar untuk menentukan seseorang dihukum "bunuh". *Kempetai* inilah yang membuat rakyat di Kalimantan selalu dalam kecemasan dan ketakutan. Banyak pegawai dan rakyat menjadi korban dengan tidak diketahuai kuburannya. Semua itu dilakukan semata-mata hanya karena fitnah kaki tangan Jepang terutama di daerah Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur (Berau). Di daerah itu Dr. Sukardi, tiga orang *guncho*, beberapa bangsawan, dan beratus-ratus rakyat menjadi korban karena dituduh anti Jepang.

Tindakan tentara Jepang yang kasar dan perlakuan hukum yang sewenang-wenang membuat rakyat benci kepada Jepang. Walaupun sultan-sultan di Kalimantan Timur (*kooti*) dan kepala swapraja (*joo*) masih diakui oleh Jepang, tetapi mereka tetap tak berdaya untuk melindungi rakyat.

Perekonomian menjadi lumpuh, perhubungan antarpulau terputus sama sekali karena lautan dikuasai kapal selam sekutu.

Sebelum Jepang menduduki Indonesia, kapal-kapal KPM sudah menyingkir ke luar negeri. Ekspor-impor berhenti. Toko-toko menjadi kosong. Pedagang banyak mencari penghidupan dengan berkebun dan berladang.

Pegawai dan rakyat diberikan jatah makanan, tetapi kemudian dihapuskan. Persediaan lain di toko-toko habis. Pegawai-pegawai hanya memakai bahan dari kantong gandum sebagai pakaian. Rakyat banyak memakai "keloro" (semacam serat rumput purun) sebagai pengganti kain. Rakyat yang sejak zaman penjajahan sudah miskin semakin melarat.

Pergerakan dan partai-partai politik bungkem, organisasi sosial takut melakukan kegiatan. Untuk mendukung segala kegiatan dalam usahanya memenangkan perang, Pemerintah Jepang mendirikan organisasi wanita yang bernama *Fujingkat* yang anggota-anggotanya terdiri atas pegawai-pegawai wanita dan pelajar-pelajar sekolah menengah. Di beberapa tempat gadis-gadis kampung setengah dipaksakan memasuki organisasi ini. Kegiatan organisasi ini adalah mengadakan *konrohosi* (semacam gotong royong).

Organisasi kepemudaan yang disebut *Seinendan* mewajibkan pegawai pria yang masih muda usia untuk menjadi anggotanya. Mereka dilatih baris-berbaris secara militer dengan aba-aba bahasa Jepang serta dengan menyandang senapan kayu. Pelatihnya adalah serdadu Jepang.

Dalam usahanya memenangkan perang, Jepang melatih pasukan yang terdiri atas bangsa Indonesia yang disebut *heiho*. Di antara penggerakannya adalah A.M. Sangaji seorang tokoh pendiri SI cabang Samarinda dan Tenggarong, dan seorang pemuda bangsawan Kutai A.B. Sulaiman putra Pangeran Sosronegoro menteri Kerajaan Kutai. Ia gugur sebagai anggota *heiho*.

Untuk keperluan perang, tentara Jepang sangat memerlukan minyak bumi sebagai bahan bakar. Tenaga kerja didatangkan dari Jawa untuk meneruskan perusahaan tambang minyak di Tarakan, Sanga-sanga, Semboja dan Balikpapan. Tenaga kerja

itu disebut *romusha*. Para *romusha* itu sangat menyedihkan kehidupannya. Mereka dipaksa kerja keras, dengan jaminan sosial yang buruk serta makanan yang tidak memenuhi sarat-sarat kesehatan. Akhirnya banyak yang menderita sakit dan meninggal. Pada tahun 1944/1945 beratus-ratus *romusha* hidup merana. Ketika perang sedang berkecamuk di Balikpapan, para *romusha* itu melarikan diri ke Pasisir, Tenggarong dan Samarinda dengan berjalan kaki. Banyak di antara mereka yang mati di tengah jalan sebelum sampai ke tempat yang dituju.

Sampai dengan tahun 1946 para *romusha* yang terkenal dengan sebutan "evakuasi" atau "Java Evakuasi" sangat menyedihkan keadaannya. Badannya kurus-kering, tinggal kulit pembungkus tulang, dan hanya celana pendek kumal menutupi tubuhnya. Antara Penajam dan Tanah Gerogot, Balikpapan dan Loa Janan bergelimpangan tengkorak bekas *romusha* dan para pengungsi.

Selama pendudukan Jepang, mereka tidak sempat memikirkan usaha-usaha untuk memperbaiki atau mengadakan pemekaran kota. Mereka memusatkan tenaga dan pikiran untuk keperluan perang.

1.7 Penduduk dan Mobilitas Kehidupan Kota Samarinda

Penduduk Kotamadya Samarinda dari tahun ke tahun mengalami penambahan yang cukup besar. Kenaikan rata-rata per tahun dalam Pelita II adalah 6,1%, dan pada akhir Pelita III rata-rata penambahan penduduk per tahun adalah 7,9%. Pertumbuhan penduduk ini bukan saja karena alamiah (kelahiran/kematian), akan tetapi sebagian besar disebabkan oleh adanya arus imigrasi yang setiap tahun laju pertumbuhannya semakin bertambah cepat. Menurut perhitungan Tim TAD (TAD-Report No. 8, 1977) laju pertumbuhan penduduk alamiah antara tahun 1971 sampai dengan 1975 rata-rata hanya 2,23% per tahun, akan tetapi laju pertumbuhan karena adanya imigrasi rata-rata 4,2% per tahun. Arus pendatang yang semakin bertambah cepat ini erat kaitannya dengan kegiatan pembangunan bidang ekono-

mi di kawasan ini sehingga secara tidak langsung akan menawarkan sejumlah besar kesempatan kerja. Sebelum Pelita I, yaitu periode antara 1961 sampai dengan 1970, pertambahan penduduk rata-rata per tahun hanya sebesar 5,75%, sedangkan setelah dilaksanakannya Pelita I hingga tahun 1979 laju pertumbuhan penduduk mencapai rata-rata 9,14%. Puncak pertumbuhan penduduk karena arus pendatang adalah pada tahun 1970, yakni pada saat mana Kalimantan Timur mengalami kemakmuran mendadak dengan adanya "Boom Kayu" dan pada tahun 1976 yakni pada saat Proyek LNG di Bontang mulai kegiatannya. Dibandingkan dengan tahun 1969, maka pertambahan penduduk pada tahun 1970 berjumlah sebesar 36.873 jiwa (43,7%). Pada saat Proyek LNG Bontang mulai beroperasi, kemudian ditambah pula dengan kegiatan pabrik pupuk di Kaltim, pertambahan penduduk di Kotamadya Samarinda rata-rata sebesar 29,8% per tahun (perbandingan antara jumlah penduduk tahun 1975 dengan 1979). Di samping adanya arus penduduk pencari kerja, pertambahan penduduk di wilayah Kotamadya Samarinda ini ditunjang pula oleh proyek transmigrasi yang menempati lokasi di Kecamatan Semboja, Palaran dan Samarinda Ilir. Angka-angka pertumbuhan penduduk dari tahun 1950 sampai dengan 1979 dapat dilihat pada tabel 1.

1.7.1 Penyebaran dan Komposisi Penduduk

Sejak tahun 1950 hingga sekarang, Kecamatan Samarinda Ilir selalu menduduki tempat teratas dalam jumlah penduduk, kemudian disusul Kecamatan Samarinda Ulu, dan kemudian Kecamatan Semboja. Namun kalau dipandang dari sudut kepadatan penduduk per km², maka yang terpadat adalah Kecamatan Samarinda Ilir, disusul Kecamatan Samarinda Ulu, dan kemudian Kecamatan Samarinda Seberang. Penyebaran penduduk serta kepadatan per km² dapat dilihat pada tabel 2.

Jika dilihat dari jenis kelamin, maka jumlah penduduk laki-laki selalu melebihi jumlah penduduk wanita. Hal tersebut misalnya, dapat dibuktikan pada perhitungan jumlah penduduk

menurut jenis kelamin yang dibuat pada tahun 1971, 1986 dan 1980, sebagaimana yang disajikan pada tabel 3. Pada tahun 1971 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 74.392 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 63.526 jiwa. Pada tahun 1976, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 101.472 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 84.194 jiwa; demikian pula pada tahun 1980. Pada periode tersebut jumlah penduduk laki-laki sudah mencapai 139.473 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 124.539 jiwa.

Tabel 1. Perkembangan Penduduk di Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda Tahun 1950 – 1979

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	1950	35.705
2.	1961	69.715
3.	1962	71.395
4.	1963	73.116
5.	1964	74.874
6.	1965	74.683
7.	1966	78.531
8.	1967	80.424
9.	1968	82.362
10.	1969	84.347
11.	1970	121.220
12.	1971	137.918
13.	1972	144.040
14.	1973	156.154
15.	1974	161.496
16.	1975	166.051
17.	1976	185.366
18.	1977	190.393
19.	1978	204.838
20.	1979	215.677

Sumber: Anonim, 1978; H. Dakhlan Syahrani, 1981; Anonim, 1983.

Tabel 2.

Penyebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk di Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda.

No.	Kecamatan	Kepadatan (1978)	1950	1961	1971	1976	1979
1.	Samarinda Ilir	1.670	21.238	41.107	64.030	77.204	84.945
2.	Samarinda Ulu	1.240	9.225	19.335	31.713	47.046	60.385
3.	Samarinda Seberang	691	5.242	7.653	9.547	14.329	20.750
4.	Palaran	115	—	—	5.263	8.347	9.833
5.	Sanga-sanga	27	—	11.493	9.182	9.970	10.495
6.	Muara Jawa	33	—	—	6.784	8.862	9.334
7.	Semboja	17	—	11.263	11.399	18.561	19.971

Sumber: H. Dakhlan Syakhrani, 1981; Anonim, 1983

Kalau dilihat dari jumlah penduduk usia kerja (antara 15 – 55 tahun), maka pada tahun 1971 tercatat 40.871 jiwa laki-laki (54,94%) dan 32.606 jiwa perempuan (51,32%). Pada tahun 1976 tercatat 55.091 jiwa angkatan kerja laki-laki (54,45%) dan 45.821 jiwa angkatan kerja perempuan (54,42%). *Dependency ratio* tahun 1976 adalah 1:1.84. Hal ini agak turun bila dibandingkan dengan tahun 1976 yang mempunyai *dependency ratio* sebesar 1:1.87. Keadaan penduduk menurut struktur umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Di Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda

No.	Umur	Laki-laki			Perempuan		
		1971	1976	1980	1971	1976	1980
1.	50	5.997	7.025	10.241	4.294	5.175	8.171
2.	25-49	22.014	30.975	42.724	17.964	23.522	34.236
3.	15-24	16.501	20.501	30.876	13.072	19.556	30.276
4.	10-14	8.732	11.419	15.390	8.091	9.861	14.169
5.	5-9	10.445	15.756	19.331	9.850	11.622	18.025
6.	0-4	10.703	15.496	20.911	10.255	14.458	19.662
Jumlah		74.392	101.172	139.473	63.526	84.194	124.539

Sumber: Fischer, 1977; Zimmerman, 1980.

1.7.2 Mobilitas

Pada bagian terdahulu telah diutarakan bahwa arus imigrasi yang masuk ke wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda pada umumnya terdiri atas pencari kerja. Dikatakan demikian karena puncak gelombang kedatangan mereka tepat pada tahun-tahun terjadinya puncak kegiatan pembangunan ekonomi seperti "Banjir Kap" atau "Boom Kayu" pada periode 1972/1973, dan pembangunan proyek raksasa LNG di Bontang tahun

1975/1976. Studi kependudukan yang telah dilakukan oleh Fischer, et al. (1977) menyimpulkan bahwa pertambahan penduduk yang disebabkan oleh arus imigrasi (*social growth*) pada periode 1971/1972 adalah sebesar 2,1%. Persentasi ini melonjak menjadi 6,1% pada periode 1972/1973, karena terbukanya kesempatan kerja di bidang industri kayu. Pada periode berikutnya, yakni 1973/1974, persentasi ini mendadak turun menjadi hanya 1,3%. hal tersebut terjadi karena adanya larangan resmi pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan kayu bundar dengan mempergunakan teknologi tradisional (sistem kuda-kuda), yang kemudian terkenal dengan istilah "Banjir Kap". Dinamakan demikian karena pohon setelah dipotong ditinggalkan saja di hutan, dan akan diambil manakala telah terjadi banjir. Biasanya setelah terjadi hujan lebat selama sehari, air sungai akan naik jauh ke dalam hutan yang terdapat di kiri dan kanannya, sehingga dapat menghanyutkan pohon yang telah dipotong-potong tadi. Sebagai akibat cara pemotongan secara tradisional ini banyak kayu hilang karena sulit dilakukan pengawasannya. Di samping itu kualitas ekspor sering tidak terpenuhi karena banyak kayu yang rusak. Menyadari akan kerugian yang dipikul oleh negara, pemerintah segera melarang pengambilan kayu secara tradisional tersebut. Di samping itu diterapkan pula sistem "Tebang Pilih", di mana kayu yang berdiameter lebih dari 60 cm yang boleh ditebang. Ini berarti tamatnya riwayat perusahaan tradisional yang pada umumnya dikelola oleh rakyat biasa tanpa modal, keahlian dan kemampuan manajemen seperti yang dimiliki oleh perusahaan modern dengan teknologi canggih. Lapangan kerja yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja tanpa keahlian ini pun ikut pula terkubur. Tertutupnya lapangan kerja tersebut membawa pengaruh langsung terhadap penurunan jumlah imigran sampai tingkat yang paling rendah pada periode 1974/1975, yakni hanya sebesar 0,7%. Namun pada tahun berikutnya, yakni pada periode 1975/1976, lapangan kerja baru yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja terbuka di Bontang yakni dengan dilakukannya tahap konstruksi kilang-kilang raksasa LNG. Pada periode itu sebagaimana yang telah diperkirakan

kan, terjadi lonjakan luar biasa arus imigrasi ke Samarinda sebagai pintu gerbang menuju Bontang. Pertambahan penduduk karena imigrasi itu berjumlah sebesar 10,6%.

Pada periode antara 1971 dan 1976, kecamatan yang paling banyak menerima imigrasi adalah Samarinda Ulu, kemudian disusul oleh Semboja, Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang. Samarinda Ulu paling banyak menerima para pendatang pencari kerja karena pada periode tersebut di sana telah mulai dibangun industri kayu yang banyak menyerap tenaga kerja. Kecamatan Semboja mengalami pertambahan penduduk yang cukup tinggi karena sebagai penerima program transmigrasi yang disponsori oleh pemerintah. Yang tidak mengalami pertambahan, malahan penurunan jumlah penduduk, adalah Kecamatan Sanga-sanga, sebesar 0,2%. Hal ini terjadi karena pada saat itu kegiatan pertambangan minyak dihentikan, padahal proyek tersebut merupakan sumber mata pencaharian utama penduduk sejak ratusan tahun yang lampau. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila sebagian penduduk kemudian meninggalkan wilayah Kecamatan Sanga-sanga untuk mencari sumber mata pencaharian yang baru di tempat lain. Persentasi migrasi di tujuh kecamatan di wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda antara tahun 1971 dan 1976 adalah Samarinda Ulu sebesar 8,2%, Samarinda Ilir sebesar 3,8%, Samarinda Seberang sebesar 3,1%, Palaran sebesar 1,6%, Muara Jawa sebesar 0,6%, Sanga-sanga sebesar 0,2%, dan Samboja sebesar 3,9% (Fuscher, 1977: 22).

Mencari data tentang mata pencaharian penduduk Kotamadya Samarinda merupakan pekerjaan yang cukup sulit. Hal ini disebabkan terutama dengan adanya sebagian besar penduduk yang belum mempunyai sumber mata pencaharian tetap. Bagi mereka sulit untuk membedakan mana pekerjaan pokok dan mana pekerjaan sambilan. Kesulitan ini memang dapat dimengerti karena masyarakat Samarinda masih berada dalam masa transisi, di mana antara lain nampak adanya diferensiasi yang tegas antara bermacam jenis pekerjaan. Kenyataan ini dapat dilihat pada tingkah laku anggota masyarakat yang melaku-

kan beberapa pekerjaan sekaligus pada periode yang sama. Yang menjadi pendorong utama dari tingkah laku tersebut tentunya adalah motivasi mencari untung. Jadi kalau ada beberapa pekerjaan yang menawarkan keuntungan tentu semuanya akan mereka kerjakan selama mereka merasa masih mempunyai kemampuan untuk melakukannya.

Berdasarkan atas beberapa kesulitan untuk mencari data tentang mata pencaharian penduduk seperti tersebut di atas, maka para peneliti di bidang ini harus mempunyai pedoman pokok untuk memberi definisi tentang mana pekerjaan pokok dan mana pekerjaan sampingan. Dalam hal ini biasanya yang dijadikan pegangan pokok adalah tempat tinggal individu yang bersangkutan berdasarkan atas kategori wilayah perkotaan (urban) atau pedesaan (*rural*). Pekerjaan penduduk kota banyak berorientasi pada bidang jasa dan perdagangan, sedangkan pekerjaan penduduk pedesaan banyak berorientasi pada bidang pertanian dalam arti luas. Namun tentunya ukuran ini bersifat sangat relatif, karena petani pada dasarnya bekerja di ladang atau di sawah hanya empat sampai lima bulan dalam setahun. Waktu yang tersisa mereka pergunakan untuk mengerjakan apa saja yang dapat mereka kerjakan dan dapat memberi penghasilan. Penghasilan yang mereka peroleh kadang-kadang besarnya jauh melebihi perolehan mereka di bidang pertanian. Dalam hal ini tentunya untuk menentukan pekerjaan pokok yang bersangkutan terbuka peluang untuk perdebatan.

Pada bagian terdahulu sudah disebutkan bahwa luas areal Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda adalah 2.727 km². Wilayah seluas itu terbagi atas daerah perkotaan seluas 166,89 km². (6,12%) dan wilayah pedesaan seluas 2.560,11 km² (93,88%). Meskipun demikian, sebagian besar penduduk, yakni 166.080 jiwa (77%) berdiam di daerah perkotaan, sedangkan sisanya yaitu 49.597 jiwa (23%) bermukim di wilayah pedesaan. Dengan pola penyebaran penduduk menurut daerah tempat tinggal seperti ini, sudah dapat diduga bahwa pola mata pencaharian mereka banyak berorientasi pada sektor non-pertanian.

Persentasi penyebaran jenis mata pencaharian penduduk di Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda dapat kita lihat pada tabel 4.

Tabel 4. Persentasi Penyebaran Jenis Mata Pencaharian Penduduk Dati II Kotamadya Samarinda Tahun 1971

Nomor	Jenis Mata Pencaharian	Persentasi
1.	Pertanian	18,3
2.	Pertambangan	4,4
3.	Industri	5,0
4.	Listrik	1,2
5.	Bangunan	4,3
6.	Perdagangan	14,8
7.	Transpor	28,0
8.	Jasa	28,0
9.	Keuangan/Perbankan	0,4
10.	Lain-lain	9,3
11.	Mencari Pekerjaan	9,6
J u m l a h		100,0

Sumber: Sensus Penduduk 1971.

BAB II. KEHIDUPAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN KOTA

2.1 Gerakan Politik di Awal Kemerdekaan RI

Setahun sesudah Jepang menduduki Kalimantan Timur, tepatnya Juli 1943, Balikpapan mulai mendapat serangan udara dari Sekutu. Sementara itu kapal selam Sekutu pun sudah beroperasi di Selat Makasar, Tarakan dan Balikpapan giliran mendapat serangan yang berakhir dengan jatuhnya Kota Tarakan pada tanggal 1 Mei 1945. Pada tanggal 1 Juli 1945 Balikpapan diduduki Sekutu. Pada awal bulan September 1945 tentara Australia tiba di Samarinda.

Setelah tentara sekutu melucuti senjata tentara Jepang, barulah rakyat tahu bahwa Jepang sudah kalah perang. Pada waktu itulah rakyat Samarinda mengetahui bahwa Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mendengar berita proklamasi itu, tokoh-tokoh pergerakan segera berunding untuk mengadakan kegiatan dalam mempertahankan kemerdekaan. Salah satu keputusan yang penting ialah bahwa mereka menganggap perlu memilih seorang tokoh memimpin gerakan itu.

Pilihan jatuh pada Dr. Suwaji Prawirohardjo, kepala Rumah sakit umum, karena diketahui ia adalah seorang nasionalis

intelek berpendidikan tinggi. Selain itu ada empat orang dokter di Kalimantan Timur yang oleh rakyat dianggap sebagai tokoh perjuangan yaitu dr. Sendok di Bulungan, dr. A. Rivai (seorang Minang), dr. Soewondo di Tenggarong, dr. Soewadji di Samarinda, dan seorang dokter yang waktu itu bertugas di Berau.

Atas inisiatif dr. Soewadji dan beberapa tokoh nasionalis di Samarinda, dibentuklah suatu badan yang dinamakan Panitia Persiapan Penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia (P3 KRI) yang diketuai oleh dr. Soewadji Prawirohardjo. P3KRI itu didukung oleh seluruh rakyat karena hampir setiap kampung diminta mengirinkan wakilnya pada panitia itu, yang kebanyakan terdiri tokoh pergerakan, pemuka agama dan pemuda.

Pada tanggal 23 September 1945 di rumah Tengku Montel, seorang tokoh pergerakan pensiunan pegawai BPM, dibentuklah suatu badan oleh pemuda-pemuda di Samarinda yang bernama "Penjaga Keamanan Rakyat" dengan tujuan "Mempertahankan dan Mewujudkan Isi Proklamasi 17 Agustus 1945". Di Balikpapan dibentuk pula Barisan Pembontak Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Kasmani dan Dasuki. Pada tanggal 12 Oktober 1945 di Sanga-sanga dibentuk Badan Penolong Perantau Jawa di bawah pimpinan R. Soekasmo yang kemudian diubah menjadi Barisan Pembela Rakyat Indonesia. Di Tenggarong juga dibentuk Gerakan Rakyat Kutai di bawah pimpinan dr. Soewondo, H. Abdul Gani, Hasanuddin Sultan Larangan, Sultan Baginda Husin dan J.F. Sitohang.

Untuk melumpuhkan kekuatan tentara Belanda dan memberikan semangat perjuangan kemerdekaan kepada rakyat Kalimantan Timur barisan-barisan perjuangan itu mengadakan serangan-serangan terhadap tangsi militer dan polisi di Balikpapan, mengadakan sabotase dengan cara membakari gudang-gudang perusahaan Belanda di Samarinda. Puncak dari kegiatan perjuangan rakyat itu ialah terjadinya perebutan tangsi militer di Sanga-sanga. Pada tanggal 27 Januari 1947 Barisan Pembontak Rakyat Indonesia (BPRI) Sanga-sanga di bawah pimpinan Soekasmo, Toekiman, Abdullah Thomas dan kawan-kawan, BPRI

Balikpapan di bawah pimpinan Herman Runturambi dan kawan-kawan, bekerja sama dengan anggota KNIL Budiyo, Ronodiwiryo, Dumiran dan kawan-kawan yang pro-RI dapat menduduki tangsi militer dan tangsi polisi selama tiga hari. Setelah terjadi pertemuran yang sengit dengan tentara Belanda yang dikirim dari Samarinda dan Balikpapan, barisan pejuang mengundurkan diri pada tanggal 29 Januari 1947.

Dalam pertempuran itu 70 orang pejuang dan rakyat gugur dan 30 orang luka-luka. Di pihak Belanda tiga orang tentara, satu orang komandan polisi dan satu orang agen polisi tewas. Dari 15 orang anggota KNIL yang memihak kaum pejuang enam orang tewas, lima orang hilang dan empat orang ditahan, sementara 14 orang lainnya yang tersangka ikut kaum pejuang masih dalam penjara.

Sebagai akibat dari peristiwa pertempuran Sanga-sanga, itu berpuluh-puluh pejuang anggota BPRI Balikpapan, Sanga-sanga, Samarinda, orang-orang yang dicurigai, yang mendalangi, yang bersimpati di Tenggarong, Loa Kulu, dan di sepanjang Sungai Mahakam ditangkapi dan dipenjarakan. Di antara mereka itu terdapat nama-nama Raden Mas Noto Sunardi, J.F. Sitohang, H. Djunaid Sanusi, Bustani, Harun Nafsi, Hasan, Mas Sarman dan lain-lain. Demikian pula pejuang-pejuang politik, pengurus dan aktivis Ikatan Nasional Indonesia (INI) seperti Aminuddin Nata, Tayib Kesuma, S. Mawengkang, A.B. Djapri dan lain-lain ditangkap dan dipenjarakan, sedang H. Abdul Gani sudah terlebih dahulu dipenjarakan karena dituduh membantu dan merencanakan pembontakan.

Untuk membuat gerakan bawah tanah para pejuang tidak berdaya. Beberapa tokoh yang tidak terlibat langsung dalam perjuangan bersenjata seperti Dr. Soewadji dipindahkan sebagai *strafoverplaatsing* ke Palu, sedangkan Sutan Baginda Husin dipindahkan ke Berau. Di Berau Sutan Baginda Husin membentuk Mekerib (Menuju Kemajuan Rakyat Indonesia Berau) bersama-sama beberapa aktivis maupun simpatisan organisasi seperti INI Raden Achmad, Muhammad Noor dan kawan-kawan. Karena

pertimbangan situasi dan kondisi setempat, maka Mekerib mengambil sikap moderat. Perlu dicatat bahwa satu-satunya organisasi yang bergerak di bidang politik di Kalimantan Timur adalah INI yang mempunyai cabang dan ranting di seluruh wilayah ini. Kebanyakan pengurusnya terdiri atas pegawai, guru dan para pemuda. Pengurus INI Balikpapan terdiri atas Aminuddin (ketua umum), Tayib Kesuma (sekretaris umum), H.M. Yunus (bendahara) dan Mas Sarman, A.R. Said Muhammad, Malimudin Nata, Husin Yusuf, S. Mawengkai, dan lain-lain (pembantu). Sedangkan para pengurus INI Samarinda terdiri atas A. Muis Hasan (ketua umum), Husein (wakil I), I.A. Mungsi (wakil II), D.B. Makasangkil, Syahrumsyah Idris, Anang Sulaiman, dan R. Pringgo Sumarto (kepaniteraan), H. Badroen Arif (bendahara), dan A.B. Djapri, Abdul Gafoor, H. Isnaniyah (pembantu).

Pada tahun 1946 seluruh kota di Kalimantan Timur seperti di Tarakan, Tanjung Selor, Tanjungredeb, Tenggarong, dan Tanah Gerogot telah berdiri cabang-cabang INI, sedangkan ranting-rantingnya hampir di seluruh kecamatan telah didirikan pula. Tujuan yang mendasar dari organisasi INI adalah menggagalkan rakyat di dalam membantu perjuangan RI, menggagalkan rencana Belanda, memecah negara kesatuan RI, menggagalkan pembentukan Negara Kalimantan dan lain-lain.

Ketika tentara sekutu (Australia) mendarat di Tarakan, Balikpapan dan Samarinda, NICA (*Nederlands Indie Civil Administration*) dengan serdadu-serdadu Belanda ikut membonceng pendaratan itu. Dengan segera pegawai-pegawai NICA menghubungi sultan-sultan di Kalimantan Timur, yang rupanya masih ingin hidup senang dan tentram seperti di zaman pemerintahan penjajahan. Mereka belum mendengar Proklamasi 17 Agustus 1945, belum ada barisan atau badan pejuang dan organisasi politik INI, sebab sejak 1 Mei 1945 tentara Sekutu sudah mendarat di Tarakan dan sejak 1 Juli 1945 di Balikpapan.

Oleh karena itu NICA tidak mendapat kesulitan menempatkan pegawai-pegawainya di daerah Kalimantan Timur. Untuk menarik hati para sultan dan pegawai-pegawai yang masih setia kepada Belanda, Kalimantan Timur yang pada waktu itu masih berstatus *afdeeling (afd. Oost Borneo)*, pada bulan Januari 1946 ditingkatkan menjadi keresidenan dengan ibukota Samarinda. Pada tahun itu juga *vierkante paal* yakni Samarinda Kota yang "dipinjamkan" kepada pemerintah kolonial sejak 1896 dikembalikan ke dalam wilayah Kerajaan Kutai. Oleh pemerintahan Kerajaan Kutai Kertanegara wilayah Samarinda Kota kemudian dijadikan Kecamatan Samarinda Kota, terpisah dari Samarinda Seberang yang juga berstatus kecamatan. Kemudian Samarinda ditingkatkan statusnya menjadi Kawedanan Kutai Timur dengan ibukota Samarinda yang wilayahnya meliputi Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Sangasanga, Kecamatan Bontang dan Kecamatan Sangkulirang.

Setelah ditandatangani Perjanjian Linggarjati 15 Maret 1947, Belanda berusaha mendirikan Negara Kalimantan. Sebagai tahap pertama di Kalimantan Timur, dengan beslit tanggal 31 Juli 1947 No. 2 dan 3/A-7-Fed. dibentuk Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur yang anggotanya terdiri atas Kerajaan Kutai, Kerajaan Bulungan, Kerajaan Gunung Tabur, Kerajaan Sambalung, dan Dewan Pasir (*Neo Zelfbestuur Pasir*) dengan nama "Federasi Kalimantan Timur". Federasi Kalimantan Timur terdiri atas (1) Dewan Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur yang diketuai sultan Kutai dan (2) Dewan Kalimantan Timur.

Pada tahun 1947 Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur menunjuk anggota-anggota Dewan Kalimantan Timur sebanyak 25 orang, di antaranya satu orang wakil Belanda, dua orang wakil Tionghoa, dan satu orang wakil dari golongan minoritas lainnya. Untuk melaksanakan pemerintahan sehari-hari diangkat suatu badan yang dinamakan *Bestuurscollege* yang anggotanya berjumlah enam orang termasuk ketua dan wakil ketua. Sebagai ketuanya ditunjuk A.R. Aflus (*Naar De Nieuwe Rechterde in Indonesia deel II, Federasi Kalimantan Timur 1947*).

Pembentukan Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur dan Dewan Kalimantan ini menimbulkan reaksi keras dari organisasi politik (INI) dan rakyat Kalimantan Timur dan memberi julukan "dewan boneka" ala van Mook yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Dalam Konperensi Malino Tahun 1946, A.R. Aflus ketua *Bestuurscollege* yang berjiwa republikan dengan tegas menyatakan bahwa para sultan dan rakyat berdiri di belakang RI. Ia bersama-sama para sultan dan tokoh-tokoh politik lainnya berusaha menyadarkan rakyat Kalimantan Timur untuk membantu perjuangan kaum republik mempertahankan RI. Bahwa "dewan"-nya boleh dicap boneka, tetapi anggota-anggotanya tetap berjiwa republik dan progressif.

Pada tahun 1948 diadakan pemilihan anggota dewan yang suaranya tidak kalah revolusionernya bila dibandingkan dengan suara rakyat di luar dewan. Beberapa ketua, pengurus cabang dan aktivis INI di seluruh Kalimantan Timur terpilih menjadi ketua Dewan Bulungan, Dewan Berau, dan Dewan Kutai. Pada periode ke-2 yang bersidang tahun 1949 anggota-anggota Dewan Kalimantan Timur banyak yang terdiri atas tokoh-tokoh INI seperti Rasyid Sutan Raja Mas ketua INI cabang Tarakan, Stefanus Bandah ketua INI cabang Tanjung Selor, Muhammad Noor aktivis INI cabang Berau, Andi Caco, Damus Frans, Tayeb Kesuma INI Balikpapan.

Oleh karena anggota dewan banyak yang berjiwa republik, maka rencana Belanda hendak menciptakan Negara Kalimantan tidak terlaksana. Troepen, seorang komandan *Oost Borneo* memberikan laporannya situasi di Kalimantan Timur saat itu sebagai berikut.

"Jiwa anti Belanda telah tersebar luas di wilayah ini sehingga pihak pemerintah berusaha untuk memperlakukan dalam keadaan perang. Kesultanan yang berada di sebelah utara, khawatir kehilangan kedudukan mereka bersekongkol dengan penduduk yang memihak republik; sementara itu sebagian besar pamongpraja dan pegawai pribumi aktif ikut serta menyebarkan propaganda merah putih. Pemilihan utusan ke Konperensi Kalimantan menjadi kegagalan total,

karena beberapa utusan yang terpilih memperoleh kuasa (mandat) penggabungan dengan republik”.

Di samping peransertanya dalam menggagalkan pembentukan Negara Kalimantan, dewan juga berusaha mempercepat agar wilayah ini segera menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengeluarkan beberapa mosi. Di antaranya ialah ”Menuntut agar didatangkan misi militer Tentara Nasional Indonesia ke Kalimantan Timur sesegera mungkin.” Mosi itu dicetuskan oleh Dewan Kalimantan Timur dan ditandatangani ketuanya A.R. Kariowiti pada tanggal 30 November 1949. Ikatan Nasional Indonesia mencetuskan pula resolusi yang senada pada tanggal 8 Desember 1949 yang ditandatangani oleh A. Muis Hasan dan D.B. Makasangkil selaku ketua dan penulis organisasi politik itu. Akhirnya pada tanggal 14 Desember 1949, Pemerintah Federasi Kalimantan Timur mengeluarkan pengumuman yang bunyinya sebagai berikut.

Pemerintah Kalimantan Timur mengumumkan kepada rakyat sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 12 Desember 1949 telah tiba di Balikpapan dan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 1949 di Samarinda.

MISSIE TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK KALIMANTAN TIMUR

Maksud Tentara Nasional Indonesia misi ini telah nyata yaitu atas permintaan Pemerintah Kalimantan Timur, menyelesaikan soal-soal sekarang guna mengembalikan keamanan dan ketertiban di seluruh Kalimantan Timur. Untuk menyelesaikan ini, perlu status quo yaitu:

PERHENTIAN SEGALA PERMUSUHAN

Demikian antara lain pengumuman Pemerintah Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Pemerintah (*Bestuurscollege*) Aji Raden Afloes.

Setibanya di Samarinda Missi Tentara Nasional Indonesia yang terdiri atas Letnan Kolonel Soekanda Beratamenggala, Let-

nan I Ali Said dan Letnan I Hanafi mengeluarkan pengumuman penghentian permusuhan di Kalimantan Timur dan peresmian Tentara Nasional Indonesia dari barisan pejuang di daerah ini. Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan upacara penyerahan tugas residen kepada Pemerintah Federasi Kalimantan Timur, kecuali kekuasaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah RIS kelak. Penyerahan tugas ini dilakukan oleh Residen Hollestelle sebagai wakil Pemerintah Belanda dan A.R. Afloes sebagai wakil Pemerintah Federasi Kalimantan Timur. Sebagai puncak kemenangan perjuangan bangsa Indonesia dalam usaha mempertahankan kemerdekaannya pada tanggal 27 Desember 1949, Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink menyerahkan kekuasaan Pemerintah Belanda di Indonesia kepada delegasi RI yang diketuai oleh Sultan Hamengkubuwono. Di Samarinda upacara penyerahan kedaulatan itu dilakukan di bekas rumah residen Kalimantan Timur. Residen Hollestelle sebagai wakil Pemerintah Pusat menyerahkan sisa-sisa kekuasaan yang masih menjadi tanggungjawabnya kepada Ketua Majelis Pemerintah Federasi Kalimantan Timur A.R. Afloes.

Dari fakta-fakta dan data sejarah dalam "Lintasan Sejarah Kota Samarinda", jelaslah bahwa rakyat Kalimantan Timur berperan aktif berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Seluruh lapisan dan golongan masyarakat aktif berjuang menurut kesanggupan dan keahliannya sesuai dengan getaran jiwanya. Para pemuda berjuang secara revolusioner mengangkat senjata mengusir serdadu-serdadu Belanda dari tangsi-tangsi militer dan polisi, seperti perebutan tangsi militer di Sanga-sanga dan penyerbuan tangsi militer dan polisi di Balikpapan. Mereka juga mengadakan gerakan bawah tanah antara lain membakar perusahaan vital Belanda di Samarinda dan serangan gerilya di Sambutan, Sungai Dama dan Sungai Pinang.

Para politisi mengadakan gerakan sosial dan organisasi politik untuk menyadarkan dan mempropagandakan arti/makna kemerdekaan serta menyatukan suara rakyat agar berdiri di

belakang RI. Sungguh suatu sumbangan moral yang sangat penting bagi pemimpin-pemimpin pusat Republik Indonesia. Tokoh-tokoh masyarakat dan pegawai-pegawai memasuki dewan-dewan sebagai siasat perjuangan untuk mengarahkan dewan-dewan itu supaya segala kegiatannya senada dengan perjuangan rakyat di luar dewan. Para sultan pun turut pula memberikan sumbangan moral dengan menyatakan diri berada di belakang RI melalui juru bicaranya A.R. Afloes, Datu Muhammad, Zainuddin Sampan wakil suku Dayak pada Konperensi Malino 1946.

Tokoh-tokoh pedagang dan tokoh politisi itu juga bergerak di bidang bisnis. Mereka mengadakan perusahaan-perusahaan seperti NV. Perdi, Fa. Nusantara, *Kalimantan Banking & Trading Corporation NV*, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan Belanda yang didirikan sebelum Perang Dunia II kembali membuka perusahaannya di Samarinda. Di antaranya ialah *Borsumij*, *Internatio*, *Geo Wehry*, *Moluksche*, *Jacobson van den Berg*, dan lain-lain. Pedagang-pedagang Cina juga mulai membuka perusahaannya, di antaranya ialah *NV Liong Kheng*, *NV Kim Bie Hin*, *Heng Seng Kongsie*, dan lain-lain.

Perusahaan Pelayaran KPM yang selama pendudukan Jepang beroperasi di luar negeri, kemudian aktif kembali dengan membuka jalur pelayaran di Kalimantan Timur dan membangun kantornya kembali di Jalan Pelabuhan, sehingga perdagangan antarpulau mulai ramai.

2.2 *Kehidupan Politik dan Pemerintah Sesudah Tahun 1950*

Tidak lama setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) melebur diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, Swapraja (kerajaan) Kutai Kertanegara diubah statusnya menjadi "daerah istimewa", setingkat dengan kabupaten. Dengan adanya perubahan status tersebut maka ibukota yang tadinya berkedudukan di Tenggarong sejak tahun 1782, dipindahkan ke Samarinda. Sebagai ibukota Daerah Istimewa Kutai, di samping menjadi pusat pemerintahan, Sama-

rinda dijadikan pula sebagai tempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan (DPRD-P) Daerah Istimewa Kutai. DPRD-P tersebut dilantik pada bulan Oktober 1956. Kedudukan Samarinda selaku ibukota Daerah Istimewa Kutai hanya berlangsung kurang lebih enam tahun, karena DPRD-P Daerah Istimewa Kutai kemudian memutuskan bahwa pada akhir tahun 1956 ibukota dipindahkan ke Tenggarong. Keputusan tersebut memperoleh persetujuan menteri dalam negeri.

Kehidupan Kota Samarinda "tanpa status" tidak berlangsung lama. Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1956, Kalimantan Timur dijadikan "propinsi" dan Samarinda menjadi "ibukota propinsi". Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1959, Samarinda diberi status sebagai "kotapraja", kemudian istilahnya diubah menjadi "kotamadya". Secara resmi Kotamadya Samarinda lahir pada tanggal 21 Januari 1960. Oleh karena sebelumnya Samarinda masih berstatus pula sebagai kecamatan di Swapraja (kerajaan) Kutai, maka statusnya diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai. Daerah istimewa tersebut adalah setingkat dengan kabupaten. Sedangkan ibukotanya, yang sejak tahun 1782 berkedudukan di Tenggarong, kini dipindahkan ke Samarinda. Hal tersebut tidak berlangsung lama, karena pada bulan Oktober 1956 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan (DPRD-P) Daerah Istimewa Kutai telah memutuskan untuk memindahkan kembali ibukotanya ke Tenggarong. Keputusan tersebut mendapat persetujuan pemerintah pusat.

Tidak lama setelah Samarinda dipindah statusnya menjadi ibukota oleh Pemerintah Daerah Istimewa Kutai, pada awal tahun 1957 kota ini secara resmi dijadikan sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956. Dua tahun kemudian, yakni berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1959, setelah Samarinda dijadikan sebagai "kotapraja", kemudian diubah statusnya menjadi "kotamadya". Secara resmi Kotamadya Samarinda lahir pada tanggal 21 Januari 1960. Pada hari itu dilakukan penandatanganan nas-

kah resmi serah terima dari Sultan Aji Muhammad Parikesit kepada Kapten Soedjono, walikota yang pertama Kotamadya Samarinda. Hal tersebut terjadi, karena wilayah Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Seberang yang akan menjadi wilayah Kotamadya Samarinda, secara administratif sebelumnya berada di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah Istimewa Kutai. Upacara penandatanganan naskah serah terima tersebut berlangsung dalam suatu sidang khusus DPRD-P Daerah Istimewa Kutai di Tenggarong. Sebelumnya, Kapten Soedjono adalah perwira TNI/AD yang bertugas di Staf Kodam IX Mulawarman berkedudukan di Balikpapan. Sementara itu, berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 1959, Daerah Istimewa Kutai dihapuskan dan diubah statusnya menjadi "kabupaten". Dengan demikian tamatlah riwayat Kerajaan Kutai Kertanegara yang telah memerintah selama kurang-lebih 659 tahun di bawah kekuasaan administratif Pemerintah Daerah Istimewa Kutai.

2.3 Pemekaran Wilayah Administratif Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda

Semula wilayah administratif Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda hanya meliputi Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Seberang yang luasnya hanya meliputi kurang-lebih 167 km². Kecamatan Samarinda Kota kemudian dibagi menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Ilir, demikian pula pada awal pembentukannya Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda hanya meliputi tiga kecamatan. Dalam surat keputusan gubernur kepala daerah Propinsi Kalimantan Timur disebutkan bahwa tapal batas Kotamadya Samarinda yang telah ditetapkan pada waktu itu hanya bersifat sementara. Sembilan tahun kemudian, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur No. 18/TH-Pem/1969 tanggal 2 Februari 1969, dilakukanlah pemekaran luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dari 167 km² menjadi 2.727 km². Gambaran perbedaan luas wilayah sebeforem dan setelah dilakukan pemekaran dapat dilihat pada peta 1 dan 2 terlampir.

Dengan dilakukannya perluasan wilayah tersebut maka kecamatan yang berada di bawah wewenang administratif Pemerintah Daerah Tingkat II Samarinda menjadi tujuh. Ketujuh kecamatan tersebut ialah Kecamatan Samarinda Ulu (65 km^2), Kecamatan Samarinda ilir (69 km^2), Kecamatan Samarinda Seberang (33 km^2), Kecamatan Palaran (126 km^2), Kecamatan Muara Jawa (646 km^2), Kecamatan Sanga-sanga (406 km^2), dan Kecamatan Samboja (1.382 km^2). Jumlah = 2.727 km^2 .

Landasan hukum bagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur No. 18/1969 yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan No. 55/TH-pem/SK/1969 adalah TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966. TAP MPRS tersebut antara lain menghendaki agar pemerintah daerah kotamadya dapat melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya. Agar dapat melaksanakan TAP MPRS tersebut, yang menjadi hal pokok ialah agar pemerintah kotamadya dapat mengurus rumah tangganya dengan baik yakni tersedianya sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk menghimpun sejumlah dana baik untuk pelaksanaan kegiatan rutin maupun pembangunan. Sudah barang tentu dengan luas wilayah administratif 167 km^2 tersebut tanpa adanya sumber penghasilan yang memadai, Pemerintah Kotamadya Samarinda tidak dapat melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya, atau dengan kata lain tidak akan mampu mengurus dan menutupi keperluan rumah tangganya sendiri. Secara terperinci alasan-alasan dimasukkannya tambahan empat kecamatan ke dalam wilayah administrasi Pemerintah Kotamadya Samarinda adalah sebagai berikut.

- 1) Dengan adanya tambahan empat kecamatan tersebut Pemerintah Kotamadya Samarinda akan mampu mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Hal tersebut disebabkan keempat kecamatan tersebut memiliki potensi cukup besar untuk penggalan dana yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Seperti diketahui, di Kecamatan Sanga-sanga, Kecamatan Samboja, dan terutama di Kecamatan Muara Jawa adalah tempat beroperasi-

- nya perusahaan-perusahaan besar di bidang migas. Dengan adanya kegiatan tersebut pemerintah kotamadya akan memperoleh "retribusi" yang cukup besar;
- 2) Wilayah administratif Kabupaten Kutai terlampau luas (94.362 km²), sehingga diperlukan adanya penciptaan agar pelayanan pemerintah dapat lebih efektif di dalam mencapai seluruh kelompok sosial yang bermukim di wilayah itu;
 - 3) Keempat kecamatan tersebut letaknya lebih dekat dengan pusat pelayanan sosial, ekonomi dan pemerintahan di Samarinda bila dibandingkan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Kutai di Tenggarong. Oleh karena itu, dengan adanya penggabungan tersebut diharapkan pembinaan keempat kecamatan tersebut dapat ditingkatkan.

Dengan dilakukannya perluasan wilayah administrasi tersebut, Pemerintah Kotamadya Samarinda berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membina wilayah yang berada di bawah satuan tugas dan tanggungjawabnya. Pembangunan kota secara konsepsional, berencana dan berkesinambungan baru dimulai pada awal Pelita I, tahun 1969. Sebelum itu Samarinda hampir tidak pernah dijamah oleh pembangunan. Kalaupun ada, hanya bersifat tambal-sulam dan tak terarah. Pembangunan semacam itu biasanya dilakukan untuk mengganti bangunan yang terbakar, karena Samarinda memang terkenal sering terjadi kebakaran. Sejak tahun 1950 hingga 1979, tidak kurang dari duapuluh lima kali kebakaran. Yang paling sering mengalami kebakaran adalah komplek pertokoan di pusat kota, karena bangunan pertokoan tersebut pada umumnya terbuat dari bahan yang mudah terbakar dan letak bangunan satu dengan yang lain saling berhimpitan sehingga kalau terjadi kebakaran api cepat merambat dan sulit dipadamkan.

Seperti telah diuraikan terdahulu bahwa pembangunan kota secara berencana baru dimulai sejak awal Pelita I. Untuk itu telah disusun sebuah rencana induk Kota Samarinda yang telah disahkan oleh menteri dalam negeri dengan Surat Keputusan No. 410 tahun 1977. Prioritas pertama pada tahap awal pe-

mekaran kota tersebut adalah pembuatan prasarana perhubungan berupa jalan, baik di dalam kota maupun antara Kota Samarinda dengan Balikpapan dan Tenggarong. Kemudian dibangun pula jalan yang menghubungkan Kota Samarinda dengan pusat industri LNG dan pupuk di Bontang. Keadaan jalur jalan di dalam kota dapat dilihat dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah dilaksanakan Pelita seperti terlihat pada peta 3 (warna putih adalah keadaan jalan sebelum Pelita dan warna jingga sesudah Pelita). Kemajuan pesat di bidang kehidupan ekonomi memberi dorongan bagi tersedianya fasilitas serta prasarana kegiatan ekonomi. Pertama-tama telah dapat diselesaikan kompleks pertokoan "Pinang Babaris" pada tahun 1971, disusul dengan pembangunan pasar induk "Segiri" pada tahun 1978 sebagai pengganti pasar induk yang lama "Pasar Pagi". Pembangunan pasar induk ini disertai pula oleh pembangunan pasar-pasar inpres. Pada saat yang sama telah pula berhasil diselesaikan sebuah bangunan monumental, yakni Balai Kota Samarinda yang telah menelan biaya sebesar Rp. 1.192.000.000,00. Bangunan monumental lainnya yang juga telah diselesaikan ialah Mesjid Raya Samarinda yang diresmikan pemakaiannya oleh menteri agama pada tanggal 2 Pebruari 1974.

Dalam bidang kesejahteraan rakyat, perhatian ditujukan pada pembangunan perumahan rakyat. Pada tahun 1969 telah selesai dibangun kompleks perumahan Sendawar, kemudian kompleks perumahan pegawai Prefab (1972), kompleks perumahan Supida (1973), dan kompleks perumahan pegawai Voorfo (1975), serta kompleks perumahan Air Hitam dan Air Putih (1978). Dalam periode Pelita I dan II telah pula selesai dibangun Lapangan Udara Perintis Temindung, perluasan Pelabuhan Laut Samarinda dan Pelabuhan Ferry di Sungai Kunjang.

2.4 Kekuatan Sosial Politik

Dengan pecahnya Perang Dunia II, kegiatan partai-partai politik di Indonesia terhenti sama-sekali karena dilarang oleh Pemerintah Tentara Pendudukan Jepang. Setelah bangsa Indo-

nesia berhasil merebut kembali kemerdekaannya, pada tanggal 3 Nopember 1945 dikeluarkanlah "Maklumat Pemerintah" yang berisi anjuran pembentukan partai-partai politik. Maklumat pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta itu antara lain berisi :

- 1) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai tersebut segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur;
- 2) Pemerintah berharap supaya partai-partai politik yang telah tersusun sebelumnya segera dilakukan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946, (Iwa Kusuma Sumantri, 1961 : 53 – 54).

Sebagai konsekuensi dari maklumat pemerintah tersebut, pada saat diselenggarakannya pemilihan umum yang pertama tahun 1955, jumlah kontestan telah lebih dari empatpuluh. Di Samarinda yang pada waktu itu berstatus sebagai ibukota Daerah Istimewa Kutai, terdapat 21 kontestan. Para kontestan tersebut adalah Masyumi (34.994 suara), PNI (26.231 suara), NU (16.431 suara), PSI (11.865 suara), PRI (II) (8.933 suara), PSII (7.018 suara), PKI (6.718 suara), Partai Katholik (3.948 suara), PRI (2.646 suara), Murba (2.389 suara), PPP RI (1.332 suara), Parkindo (1.440 suara), PPTI (1.129 suara), Partai Buruh (1.064 suara), PRN (696 suara), GPP (587 suara), Parindra (574 suara), Baperki (293 suara), Gerakan Banteng (112 suara), Mutung (40 suara), dan Andi Tjatjo (61 suara) (Alfian, 1971 : 137).

Dari 267 buah kursi DPR yang diperebutkan, Kalimantan Timur tidak memperoleh sebuah kursi pun, karena jumlah pemilih yang belum mencukupi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada waktu itu jumlah penduduk di Kalimantan Timur baru sekitar 350.000 jiwa, sedangkan jumlah pemilih yang memberikan suaranya hanya 172.291 jiwa.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 14/1956 tentang pembentukan DPRD Otonom, terbukalah kesempatan bagi Kota Samarinda dengan statusnya selaku ibukota Daerah Istimewa Kutai untuk memiliki sebuah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah hasil Pemilu 1955. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/1956, DPRD peralihan Daerah Istimewa Kutai yang berkedudukan di Samarinda, memperoleh sejumlah 20 kursi. Jumlah kursi yang diperoleh masing-masing kontestan adalah Masyumi memperoleh 6 kursi, PNI memperoleh 4 kursi, NU memperoleh 3 kursi, PSI memperoleh 2 kursi, PKI memperoleh 1 kursi, Partai Katholik memperoleh 1 kursi, PSII memperoleh 1 kursi, PRI Hazairin memperoleh 1 kursi, dan PRI Bung Tomo memperoleh 1 kursi. Jumlah = 20 kursi (Anonim: 1975).

Pelantikan anggota-anggota DPRD-P dilakukan di Samarinda pada tanggal 20 Oktober 1956. Di samping pembentukan DPD (Dewan Pemerintah Daerah) Otonom. Anggota-anggota DPD ini selain ketuanya yang langsung dipegang oleh kepala Daerah Istimewa Kutai, wakil ketua serta anggota-anggotanya dipilih dari anggota-anggota DPRD-Peralihan. Partai-partai politik yang berhasil memperoleh kursi DPD Istimewa Kutai adalah Masyumi (2 kursi), PNI (1 kursi), NU (1 kursi), dan PSI (1 kursi).

Sebagai akibat dikeluarkannya Undang-undang No. 27/1959 tentang pembubaran Daerah Istimewa Kutai (wilayahnya dibagi ke dalam tiga wilayah daerah tingkat II yaitu Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai, Kotamadya Samarinda, dan Kotamadya Balikpapan), DPRD-P Daerah Istimewa Kutai serta DPD-nya dinyatakan bubar pula. Hal tersebut ditegaskan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2/2/42, tanggal 25 Nopember 1959.

Setelah Konstituante gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menetapkan dan menyusun konstitusi, presiden RI menyatakan bahwa wilayah Republik Indonesia berada dalam keadaan darurat perang. Di setiap daerah, termasuk Kalimantan Timur, dibentuk penguasa perang daerah (PEPERDA) yang mengambil alih seluruh kegiatan pemerintahan sipil. Sejak saat itu semua bentuk kegiatan politik dilarang. Hal tersebut diperkuat dengan peraturan PEPERDA No. 40/1959. Di daerah tingkat II dibentuk suatu staf Petugas Pemerintah Daerah yang

diketahui oleh seorang kepala staf Pelaksana Kuasa Perang. Sementara itu presiden RI menyatakan bahwa Masyumi, PSI, dan Murba sebagai partai terlarang.

Dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 18 tahun 1975 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1965, maka pada tanggal 28 September 1965 Kotapraja Samarinda resmi menjadi Kotamadya Samarinda. Berdasarkan UU No. 18/65 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 33/1965, jumlah anggota DPRD-GR Kotamadya Samarinda adalah 25 orang. Dari jumlah tersebut termasuk ketua dan dua orang wakil ketua. Mereka ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur No. 20/TH/Pem-1967, tanggal 7 Maret 1967. Perimbangan kekuatan antarfraksi dalam DPRD-GR tersebut disesuaikan dengan hasil Pemilu 1955. Keadaan ini terus dipertahankan hingga hasil Pemilu 1971 sudah diketahui. Perimbangan kekuatan antarfraksi tercermin dalam pembagian kursi di DPRD-GR tersebut, yakni NU (4 kursi), PSII (3 kursi), Parmusi (3 kursi), PNI (3 kursi), IPKI (1 kursi), Murba (1 kursi), Partai Katholik (1 kursi), Parkindo (1 kursi), Perti (1 kursi), TNI AD (1 kursi), Kepolisian (1 kursi), Cendekiawan (1 kursi), Pemuda/Mahasiswa (1 kursi), Angkatan 45 (1 kursi), Golkar (1 kursi), dan Angkatan 66 (1 kursi). Jumlah = 25 kursi. Adapun ketua dan dua orang wakil ketua yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur No. 20/TH-Pem/67, tanggal 7 Maret 1967 adalah Abubakar S. dari PSII (ketua) dan Akhmad Ibrahim dari NU & Zakaria dari Parmusi (wakil ketua I & II).

Upaya Pemerintah Orde Baru untuk memulihkan lembaga-lembaga demokrasi mencapai tahapan yang lebih maju ketika pada tahun 1971 dilaksanakan Pemilu yang kedua. Dengan adanya Pemilu tersebut kemudian dapatlah dilengkapi lembaga-lembaga demokrasi sesuai dengan kehendak UUD 1945. Di Samarinda, "pesta demokrasi 1971" itu membuahakan sebuah lembaga legislatif pilihan rakyat. Berbeda dengan DPRD-GR, DPRD

Kotamadya Samarinda hasil Pemilu 1971 yang hanya membuahkan 20 kursi. Dari jumlah tersebut 16 orang dipilih langsung dan empat orang lainnya diangkat. Adapun komposisi keanggotaan DPRD itu adalah Golongan Karya sebanyak 8 kursi (dipilih), Golkar ABRI sebanyak 3 kursi (diangkat), PDI sebanyak 1 kursi (dipilih), Persatuan Pembangunan sebanyak 7 kursi (dipilih), dan Golkar non-ABRI sebanyak 1 kursi (diangkat). Jumlah = 20 kursi. Adapun yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua, masing-masing adalah Mastur B. dari Golkar (ketua), Drs. Asmuni Ali dari Golkar (wakil ketua), dan Aji Johansyah dari PPP (wakil ketua). Pelantikan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 1971, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 226/Pd/Th, 1971, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur No. 162/1971.

Setelah berlangsungnya Pemilu 1977, jumlah anggota DPRD Kotamadya Samarinda tidak berubah yaitu sebanyak 20. Adapun jumlah kursi yang diperoleh masing-masing fraksi adalah PPP sebanyak 8 kursi (dipilih), Golkar sebanyak 7 kursi (dipilih), Golkar ABRI sebanyak 3 kursi (diangkat), Golkar non-ABRI sebanyak 1 kursi (diangkat), dan PDI sebanyak 1 kursi (dipilih). Jumlah = 20 kursi. Kedudukan ketua dan wakil ketua, masing-masing dijabat oleh Drs. H. Asmuni Ali dari Golkar (ketua), M. Badawi dari Golkar (wakil ketua), dan Aji Johansyah dari PPP (wakil ketua). Mereka dilantik oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur atas nama menteri dalam negeri pada tanggal 6 Juli 1977.



BAB III KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA

3.1 Agama

Seperti yang tertulis pada prasasti Yupa yang dibuat oleh Raja Mulawarman, sejak kurang-lebih abad ke-4 Masehi penduduk di kawasan ini sudah memeluk agama Hindu. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, sebagian besar penduduk Kotamadya Samarinda memeluk agama Islam. Agama kedua terbesar di Samarinda ialah agama Kristen Protestan, kemudian agama Katholik, agama Budha dan agama Hindu. Persentasi pemeluk agama-agama di Samarinda dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. **Persentasi Pemeluk Agama-agama di Kodya Samarinda Tahun 1978**

No.	P e m e l u k	Persentasi
1.	Agama Islam	93,96 %
2.	Agama Protestan	1,93 %
3.	Agama Katholik	1,92 %
4.	Agama Budha dan Kong Fu Tze	1,64 %
5.	Agama Hindu	0,55 %

Sumber: Kanwil Departemen Agama, 1978.

Sebagaimana diketahui bahwa masing-masing agama mempunyai tempat-tempat ibadah yang berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena mayoritas penduduk Kotamadya Samarinda beragama Islam, maka wajarlah kalau perkembangan tempat-tempat ibadah agama tersebut setiap tahun jauh lebih pesat jika dibandingkan dengan agama lainnya. Pembangunan tempat ibadah agama Islam maupun agama lainnya dilaksanakan secara swadaya oleh para pemeluknya. Dalam banyak hal pembangunan tempat ibadah tersebut memperoleh pula bantuan dari pemerintah. Adapun perkembangan tempat ibadah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dapat dilihat pada tabel 6.

Pada tanggal 28 Juli sampai dengan 4 Agustus 1976, di Kotamadya Samarinda telah diselenggarakan MTQ Nasional ke-9. Penunjukan Kota Samarinda menjadi tempat penyelenggaraan MTQ tersebut berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 5 tahun 1976. Penyelenggaraan perebutan lomba seni baca Al Qur'an terbaik tingkat nasional tersebut diikuti oleh utusan dari 26 propinsi. Dalam MTQ ke-9 tersebut ternyata peserta dari Samarinda mampu meraih juara sebagai qori terbaik tingkat nasional, dan bahkan kemudian mampu pula meraih gelar qori terbaik internasional di Kuala Lumpur. Hasil "ikutan" yang diperoleh dengan diselenggarakannya MTQ ke-9 tersebut ialah didirikannya proyek-proyek monumental berupa Perguruan Ilmu Al-Qur'an di Samarinda, Pondok Pesantren Karya Pembangunan di Kampung Timbau, Kecamatan Tenggarong, dan Pondok Pesantren Hidayatullah di Balikpapan.

Untuk memberi wadah bagi kegiatan yang dilakukan umat Kristen, pada tahun 1972 pemerintah kotamadya memprakarsai pembangunan Gelanggang Kristen Samarinda. Bangunan tersebut didirikan di atas tanah seluas 25.000 m² di Kampung Sidomulyo, Samarinda Ilir. Peresmian pemakaian kompleks Gelanggang Kristen Samarinda tersebut dilakukan oleh menteri agama cq Dirjen Bimas Kristen.

Tabel 6. Perkembangan Tempat-tempat Ibadah di Kotamadya Samarinda 1969 – 1977

No.	Tahun	Mesjid	Langgar	Musholla	Gereja Katholik	Gereja Protestan	Vihara Budha	Klenteng
1.	1969	50	154	—	6	8	4	1
2.	1970	50	161	—	6	9	4	1
3.	1971	52	165	—	6	10	4	1
4.	1972	52	165	—	7	11	4	1
5.	1973	55	166	—	8	11	4	1
6.	1974	60	165	—	8	10	4	1
7.	1975	61	167	8	8	10	1	1
8.	1976	66	183	9	8	10	1	1
9.	1977	74	188	11	8	10	1	1

Sumber: Kantor Departemen Agama Kodya Samarinda.

3.2 Pendidikan

Berbicara masalah pendidikan, akan lebih mudah dipahami jika dimulai dari uraian tentang keadaan penduduk pada usia sekolah, yakni antara umur 7 sampai dengan 12 tahun. Jumlah penduduk yang termasuk ke dalam kategori tersebut adalah 40.004 jiwa atau 18,54% dari total penduduk Kotamadya Samarinda. Jumlah terbesar dari penduduk pada usia sekolah ini bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir (16.641 jiwa), Kecamatan Samarinda Ulu (10.464 jiwa), Kecamatan Semboja (3.589 jiwa). Yang perlu dicatat adalah bahwa persentasi terbesar penduduk usia sekolah yang belum bersekolah terdapat di Kecamatan Muara Jawa, yakni sebesar 23%, kemudian Kecamatan Palaran (14,4%), dan Kecamatan Semboja (10%). Perlu diketahui bahwa sebagian besar penduduk ketiga kecamatan bekerja sebagai petani. Karena sibuknya, maka ada kemungkinan mereka lalai menyekolahkan anaknya, atau barangkali tenaga anak-anak tersebut memang sangat dibutuhkan untuk membantu pekerjaan mereka sehingga tidak ada waktu untuk pergi ke sekolah. Persentasi yang cukup tinggi pelajar putus sekolah juga ditemukan di Kecamatan Semboja (2,7%) dan di Kecamatan Muara Jawa (2,4%). Diduga hal ini juga erat kaitannya dengan kebutuhan akan tambahan tenaga kerja di lingkungan keluarga petani.

Kalau dilihat dari angka absolut, ternyata jumlah terbesar anak usia sekolah yang belum bersekolah terdapat di Kecamatan Samarinda Ilir (765 jiwa), kemudian Kecamatan Samarinda Ulu (704 jiwa), Kecamatan Muara Jawa (412 jiwa) dan Kecamatan Semboja (376 jiwa). Keadaan penduduk usia sekolah, jumlah anak usia sekolah yang belum bersekolah serta jumlah anak putus sekolah per kecamatan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Jumlah dan Persentasi Penduduk Usia Sekolah, Belum Bersekolah, dan Putus Sekolah di Tujuh Kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda

No.	Kecamatan	Belum Bersekolah	%	Masih Bersekolah	%	Drop Out	%	Jumlah
1.	Samarinda Ilir	765	4,6	15.617	93,8	259	1,6	16.641
2.	Samarinda Ulu	704	6,7	9.631	92,0	129	1,3	10.464
3.	Samarinda Seberang	268	7,5	3.265	91,0	56	1,5	3.589
4.	Sanga-sanga	58	3,2	1.714	95,2	29	1,6	1.801
5.	Palaran	284	14,4	1.659	84,2	28	1,4	1.971
6.	Samboja	376	10,0	3.270	87,3	100	2,7	3.746
7.	Muara Jawa	412	23,0	1.336	74,6	44	2,4	1.792
Total:		2.867	—	36.492	—	645	—	40.004

Sumber: Zimmermann, 1980

Untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi 40.004 penduduk usia sekolah seperti tertera pada tabel tersebut pemerintah telah membangun 1.042 ruang belajar. Di samping itu pihak swasta ikut pula berpartisipasi dengan membangun 167 ruang belajar. Menurut data yang ada, ruang belajar tersebut telah menampung 38.061 murid di sekolah negeri dan 6.839 murid di sekolah swasta. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tak ada lagi penduduk usia antara 7 sampai dengan 12 tahun yang tidak tertampung di sekolah dasar.

Jumlah guru negeri untuk sekolah dasar sebanyak 1.291 orang, dan sekolah swasta 169 orang. Ini berarti telah tercapai suatu perimbangan yang ideal antara guru dan murid, terutama di sekolah negeri, yakni 1:30, akan tetapi sekolah swasta agak mengalami kekurangan tenaga pengajar di mana ratio guru dan murid adalah 1:41. Jumlah murid pada setiap ruang kelas untuk sekolah negeri rata-rata 1:36,5, sedangkan untuk sekolah swasta 1:41. Data tentang jumlah ruang kelas, jumlah guru dan murid, ratio guru/murid, serta ratio murid/kelas dapat dilihat pada tabel 8.

Untuk menampung lulusan Sekolah Dasar, di wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda telah berdiri 14 buah SLTP Negeri dan 19 buah SLTA Swasta dengan daya tampung 5.156 murid negeri dan 3.739 murid swasta. Jumlah kelas yang tersedia sebanyak 133 buah di SLTP negeri dan 105 buah di sekolah SLTP swasta. Dengan demikian ratio kelas murid adalah 1:38,6 SLTP negeri dan 1:35,6 di SLTP swasta. Jumlah tenaga pengajar sebanyak 256 orang di SLTP Negeri dan 281 orang SLTP swasta. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa ratio guru/murid adalah 1:20,1 di SLTP negeri dan 1:13,3 di SLTP swasta. Di antara tujuh kecamatan di wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda tersebut hanya Kecamatan Muara Jawa yang belum mempunyai SLTP negeri, akan tetapi telah ada sebuah sekolah swasta.

Tabel 8. Keadaan Sekolah Dasar di Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda

No.	Kecamatan	Sekolah Dasar		Kelas		Guru		Murid		Ratio Guru/Murid		Ratio Guru/Murid	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1.	Samarinda Ilir	41	11	348	110	466	123	14.454	4.573	31,0	37,1	41,5	41,0
2.	Samarinda Ulu	30	3	279	39	413	29	11.283	1.681	27,3	58,0	40,4	43 0
3.	Samarinda Seberang	13	2	90	7	103	7	3.196	273	31,0	39,0	35,5	39,0
4.	Sanga-sanga	14	1	74	11	82	10	1.851	312	22,5	31,2	25,0	28,0
5.	Palaran	8	—	56	—	46	—	1.886	—	41,0	—	33,7	—
6.	Samboja	22	—	124	—	116	—	3.650	—	31,5	—	29,4	—
7.	Muara Jawa	13	—	71	—	65	—	1.741	—	26,9	—	24,5	—
Jumlah		141	17	1.042	167	1.291	169	38.061	6.839	29,5	40,5	36,5	11,0

Sumber: Zimmermann, 1980

Keterangan: N = Negeri; S = Swasta

Sejak tahun 1952 di Kota Samarinda telah berdiri sebuah Sekolah Menengah Atas Negeri. Dengan semakin bertambah cepatnya laju pertumbuhan penduduk maka jumlah SLTA di wilayah Kotamadya Samarinda semakin bertambah pula. Pada akhir tahun 1979 telah tercatat sebanyak delapan buah SLTA negeri dan 17 buah SLTA swasta, dengan jumlah kelas 94 buah untuk SLTA negeri dan 81 buah untuk SLTA swasta. Jumlah siswa yang belajar di sekolah tersebut adalah 3.580 murid di sekolah negeri dan 2.977 murid di sekolah swasta. Rasio murid/kelas cukup baik, yaitu 1:38,1 di SLT negeri dan 1:36,8 di SLTA swasta. Kalau dilihat dari ratio guru/murid ternyata SLTA di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda nampaknya masih mampu menyerap sejumlah besar siswa. Hal ini didasarkan atas rasio guru/murid yang cukup rendah, yaitu 1:19,2 untuk sekolah negeri dan 1:9,8 untuk sekolah swasta. Sampai pada akhir tahun 1979 kecamatan yang belum juga memiliki SLTA adalah Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran, dan Kecamatan Muara Jawa. Kecamatan yang belum memiliki SLTA negeri adalah Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Sanga-sanga, Kecamatan Palaran, Kecamatan Samboja, dan Kecamatan Muara Jawa.

Untuk menampung minat masyarakat terhadap pendidikan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur telah memprakarsai berdirinya sebuah perguruan tinggi negeri Universitas Mulawarman pada akhir tahun 1962. Pada permulaan berdirinya, universitas ini mempunyai tiga fakultas, yakni Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Ketatanegaraan dan Fakultas Ketataniagaan. Kini jumlah fakultasnya sudah ada lima, yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kehutanan. Jumlah mahasiswa seluruhnya sebanyak 3.160 orang dengan 126 orang tenaga dosen tetap dari berbagai disiplin ilmu. Kegiatan administrasi maupun akademi sebagian besar telah dipusatkan di Kampus Gunung Kalua dengan areal seluas 65 ha.

Di samping Universitas Mulawarman, penyelenggaraan pendidikan tinggi di kota ini dikelola pula oleh beberapa perguruan tinggi swasta seperti Universitas Tujuhbelas Agustus (UNTAG), UNINUS, FKIP, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.

3.3 Kebudayaan

Gambaran umum tentang situasi kebudayaan yang terdapat di wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda dapat dilihat dari dua aspek, yakni peninggalan kepurbakalaan dan kesenian yang masih hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tentang aspek yang pertama, yakni peninggalan kepurbakalaan yang ada kaitannya dengan sejarah kelahiran dan perkembangan Kota Samarinda, masih belum banyak yang dapat diutarakan. Kemungkinan benda peninggalan kepurbakalaan tersebut terbuat dari kayu atau bahan lain yang cepat hancur atau sudah lenyap tanpa meninggalkan bekas. Ada kemungkinan pula bahwa benda-benda tersebut belum ditemukan, karena studi khusus tentang penggalian bekas peninggalan purbakala hingga kini belum pernah dilakukan di kawasan Kotamadya Samarinda. Benda peninggalan kepurbakalaan yang kini telah diketemukan hanyalah berupa dua buah kuburan; yang pertama terdapat di Kampung Mangku Palas, Kecamatan Samarinda Seberang. Pada batu nisan tersebut terdapat tulisan Arab berbunyi "Pangeran Raja Surya". Kuburan yang kedua terdapat di Kampung Sungai Kerbau, Kecamatan Samarinda Ilir. Kuburan itu sendiri nampaknya sudah terpendam di dasar anak sungai yang sudah mati. Pada permukaannya hanya tampak sebuah nisan besar yang terbuat dari kayu ulin yang tulisannya sudah sukar dibaca. Seperti halnya pada penemuan yang pertama, nampaknya tulisan tersebut memberi petunjuk tentang siapa yang dimakamkan di situ. Sejak lama kuburan tersebut dikenal orang dengan nama "Makam Sungai Kerbau" dan dianggap keramat oleh penduduk sekitarnya. Pada hari-hari libur masih banyak pengunjung yang datang ke tempat itu untuk membayar "hajat" sambil meminta sesuatu. Menurut cerita rakyat setempat, yang

dimakamkan di kuburan tersebut adalah seorang arsitek istana Raja Kutai Martapura asal Majapahit. Setelah pembangunan istana selesai, arsitek tersebut dibunuh oleh raja, karena khawatir hasil karya arsitek tersebut ditiru atau ditularkan kepada orang lain. Diceritakan bahwa Kerajaan Kutai Martapura waktu itu beribukota di Kutai Lama (\pm 60 km dari Kota Samarinda). Mayatnya segera dimakamkan dengan penuh rahasia, tetapi karena arsitek tersebut termasuk orang suci, maka makamnya turun ke Sungai Mahakam dan hanyut ke arah ulu sungai. Sesampainya di suatu tempat yang kini bernama Kampung Sungai Kerbau, makam tersebut naik ke darat dan berada di tempat tersebut sampai saat ini.

Jenis-jenis kesenian yang hidup dan berkembang di suatu tempat tertentu biasanya tidak dapat dipisahkan dari kelompok masyarakat (*ethnic group*) yang menjadi pewaris dan sekaligus pemelihara kesenian tersebut. Kesenian yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kotamadya Samarinda pun dapat dipelajari dari *ethnis group* yang menjadi pewarisnya, yakni suku Bugis, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Jawa berasal dari warisan sub kebudayaan (*sub culture*) keempat *ethnis group* tersebut. Jenis-jenis kesenian yang dimaksud disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Banyaknya Kesenian di Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda Diperinci Menurut Jenisnya dari Tahun 1970 - 1977

No.	Jenis Kesenian	T a h u n							
		1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
1.	Mamanda	6	7	7	8	8	8	9	9
2.	Ludruk	3	3	5	6	6	6	7	7
3.	Ketoprak	2	2	2	3	3	4	4	5
4.	Wayang Kulit	6	6	7	7	8	8	9	9
5.	Wayang Golek	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Sinden	2	2	2	3	2	2	3	3
7.	Reog	1	1	1	2	2	2	3	3
8.	Kerawitan	1	1	1	2	2	2	2	2
9.	Hadrah/Barudat	6	6	6	5	5	6	7	7
10.	Madihin	1	1	1	1	1	1	1	2
11.	Balamut	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Tingkilan	2	2	2	2	2	2	2	2
13.	Rebana	1	3	5	7	8	10	1	10
14.	Drama	5	5	7	9	9	9	9	10
15.	Orkes Melayu	5	6	6	6	6	6	7	7
16.	Damarwulan	2	3	3	3	3	2	3	3
17.	Orkes Daerah	2	3	3	5	5	5	5	5
18.	Orkes Gambus	—	—	—	—	1	1	1	1
19.	Band	3	3	4	4	5	5	5	5
20.	Sulap	1	1	1	1	1	1	1	1
21.	Seni Silat	—	—	—	1	1	1	1	1

Sumber: Kanwil Departemen Agama, 1978.

BAB IV. PERANAN EKONOMI KOTA SAMARINDA

4.1 *Peranan Ekonomi Kota*

Di samping faktor-faktor lain seperti politik, pemerintahan dan sosial budaya, peranan ekonomi dalam pertumbuhan dan perkembangan sesuatu kota amatlah besar. Tidak sedikit kota-kota besar di Indonesia tumbuh dan berkembang karena potensi dan kegiatan ekonomi yang besar dan tinggi; di antaranya ialah Kota Samarinda yang kita uraikan ini.

Samarinda sebagaimana disebutkan di atas, tumbuh dan berkembang karena potensi dan kegiatan ekonomi serta didukung oleh faktor politik dan pemerintahan. Sejak berdirinya (tahun 1730) luas wilayah Samarinda hanya sekitar satu pal persegi (satu pal = ± 1,5 km). Wilayah sempit yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi ini oleh Belanda disebut *Vierkante paal gebeid*.

4.2 *Pusat Kegiatan Ekonomi Daerah*

Sebagai kota besar, Samarinda terus berkembang. Perkembangan Kota Samarinda sudah barang tentu tidak terlepas dari potensi ekonomi kota-kota kecil dan desa-desa di sekitarnya. Kota-kota kecil dan desa yang mendukung pertumbuhan serta perkembangan ekonomi Samarinda dapat kita telusuri sejak 1 Januari 1946 yaitu pada saat Samarinda ditetapkan sebagai ke-

residenan hingga tahun 1969, pada saat penetapan wilayah Kotamadya Samarinda berdasarkan SK Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur No. 18/th-Pem/1969 tertanggal 2 Pebruari 1969, hingga akhir Pelita II tahun 1979.

Pada tanggal 1 Januari 1946 Kalimantan Timur yang pada saat itu masih dikuasai Belanda "NICA" ditetapkan menjadi ke-residenan. Samarinda sebagai ibukota keresidenan memiliki wilayah 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Sanga-sanga, Kecamatan Bontang dan Kecamatan Sangkulirang. Penghasilan daerah-daerah kecamatan ini harus dibawa ke Samarinda untuk dipasarkan.

Kecamatan Kota Samarinda sendiri pada saat itu bertindak sebagai kota perdagangan dan pemerintahan. Oleh karena itu kebanyakan penduduknya hidup sebagai buruh, pedagang, dan pegawai. Untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan tentu saja haus didatangkan dari luar kota Kecamatan Samarinda di antaranya ialah dari kota-kota kecil maupun desa-desa di sepanjang Sungai Mahakam atau yang terdekat dengan Kota Samarinda seperti Loa Janan, Loa Kulu, Pelaran, Tenggarong, Sebulu, Muara Kanan, Kota Bangun, dan Muara Muntai. Sebagai kota perdagangan, Samarinda merupakan tempat penumpukan hasil-hasil dari daerah pedalaman Mahakam dan daerah-daerah pantai seperti Sanga-sanga, Bontang dan Sangkulirang.

Hasil-hasil dari kota-kota kecil maupun desa di sekitar Kota Samarinda ada yang dipasarkan di Samarinda dan sekitarnya dan ada pula yang dikirim ke luar daerah ataupun ke luar negeri. Barang-barang yang dipasarkan di Samarinda dan sekitarnya antara lain ialah sayur-sayuran, beras (untuk mencukupi kebutuhan, sebagian masih didatangkan dari Jawa dan Sulawesi), buah-buahan (sebagian juga masih didatangkan dari Sulawesi dan Kalimantan Selatan), berbagai macam ternak (untuk keperluan akan daging masih didatangkan dari Donggala), ikan dikirim ke Jawa, sarang burung (sebagian besar dikirim ke Jawa bahkan ke Hongkong dan Singapura), berjenis-jenis kayu (sebagian besar dikirim ke luar daerah terutama ke Sulawesi dan

Jawa, kopra (dikirim ke Jawa terutama Surabaya), dan bahan bakar minyak. Sedangkan yang hampir seluruhnya dikirim ke luar daerah ataupun ke luar negeri antara lain ialah karet, buah tengkawang, sarang burung, berbagai jenis kayu, hasil-hasil hutan seperti rotan, damar, getah jelutung, berjenis-jenis ikan, kopra, batu bara, dan berjenis-jenis bahan bakar minyak.

Perlu pula diketahui bahwa barang-barang tersebut sebelum dikirim ke luar daerah dan atau ke luar negeri digudangkan, dibersihkan, dan dikemasi terlebih dulu di Samarinda. Kegiatan ini banyak menyerap tenaga kerja dan banyak pengusaha dan pedagang yang melaksanakan kegiatan sehingga pemerintah makin sibuk dalam rangka pengurusan dan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan perekonomian itu.

Tidak semua kebutuhan rakyat Samarinda dan sekitarnya dan kota-kota kecil ataupun desa-desa di sekelilingnya bahkan di wilayah keresidenan itu dapat dipenuhi sendiri. Beberapa di antaranya harus didatangkan dari luar daerah maupun luar negeri seperti bahan-bahan pakaian, mesin-mesin, prabot rumah tangga, obat-obatan, bermacam-macam barang kelontong, makanan dan minuman dalam kaleng, alat-alat untuk pertambangan, dan lain-lain. Barang-barang tersebut didatangkan oleh para pedagang sehingga terjadi kegiatan perdagangan. Kapal, pelabuhan, gudang, dan toko setiap tahun kegiatannya bertambah. Semua ini menimbulkan terjadinya pertumbuhan kota.

4.3 Sebagai Ibukota Federasi Kalimantan Timur

Pada tahun 1947, oleh Belanda dibentuklah "Federasi Kalimantan Timur" yang terdiri atas Kesultanan Kutai, Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur dan Pasir yang berstatus "neo-swapraja" dengan ibukotanya Samarinda (Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda 1978 halaman 12). Dengan demikian pada tahun 1947 itu Kota Samarinda berfungsi sebagai ibukota kepatihan Kutai Timur, ibukota keresidenan dan ibukota Federasi Kalimantan Timur.

Dari struktur dan aktivitas pemerintahan ini saja dapat kita menarik kesimpulan bahwa berbagai kebutuhan akan bertambah. Kebutuhan pangan, sandang dan jasa akan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya; demikian pula peredaran uang akan bertambah besar. Semuanya ini merupakan faktor-faktor penggerak tingginya mobilitas kegiatan ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi sebagaimana disebutkan terdahulu, Kota Samarinda bertindak sebagai :

- 1) Pasar bagi konsumen penduduknya, yang hasilnya datang dari kota-kota kecil dan desa-desa di sekitarnya;
- 2) Pasar bagi konsumen penduduknya, untuk barang-barang yang didatangkan dari luar daerah keresidenan, kepatihan dan Federasi Kalimantan Timur;
- 3) Transito bagi barang-barang yang dibutuhkan oleh kota-kota kecil dan di desa-desa di sekelilingnya;
- 4) Transito bagi barang-barang produksi kota-kota kecil dan desa-desa untuk dikirim ke luar daerah dan bahkan ke luar negeri.

Demikianlah, dilihat dari kegiatan ekonomi dengan dijadikannya Samarinda sebagai ibukota Federasi Kalimantan Timur merupakan faktor pendorong tambahan dari pada kondisi yang telah ada. Kegiatan ekonomi akan bertambah bila dibandingkan pada saat ditetapkannya Samarinda sebagai ibukota keresidenan.

4.4 Sebagai Ibukota Daerah Istimewa Kutai

Pada bulan Agustus 1950 dibentuk Swapraja (kerajaan) Kutai setingkat kabupaten dengan ibukotanya Samarinda. Jadi pada tahun 1950 itu Kota Samarinda bertindak sebagai ibukota keresidenan yang pada 10-4-1950 menyatakan menggabungkan diri dengan RI Yogyakarta, ibukota Federasi Kesultanan Kalimantan Timur dan ibukota Daerah Istimewa Kutai. Sebagai ibukota Daerah Istimewa Kutai, maka di Samarinda terdapat juga DPRD (Peralihan) Daerah Istimewa Kutai. Dengan sendiri-

nya bertambahlah kegiatan khususnya di bidang pemerintahan. Kegiatan ini membawa dampak bertambahnya penduduk. Bertambahnya penduduk meminta pertambahan berbagai kebutuhan. Kebutuhan ini ada yang dihasilkan oleh kota-kota kecil dan desa-desa di sekitarnya, tetapi ada pula yang harus didatangkan dari luar.

Sebagaimana dikatakan terdahulu keadaan ini mendorong kegiatan ekonomi, memperamai hubungan timbal-balik antara Samarinda dan kota-kota kecil dan desa-desa di sekitarnya.

4.5 Sebagai Ibukota Propinsi dan Ibukota Kotamadya

Berdasarkan undang-undang No. 25 tahun 1956, Keresidenan Kalimantan Timur diubah statusnya menjadi Propinsi Kalimantan Timur dengan ibukotanya Samarinda, walaupun realisasinya baru dilaksanakan tahun 1957. Tetapi kurang-lebih setahun kemudian ibukota Daerah Istimewa Kutai dipindahkan dari Samarinda ke Tenggarong. Perubahan status di bidang politik dan pemerintahan ini membawa perubahan besar pula di bidang kegiatan ekonomi. Sebagai ibukota propinsi tentunya diperlengkapi dengan perangkat pemerintahan, baik yang sifatnya vertikal maupun otonom atau daerah. Gedung-gedung, perumahan-perumahan, pengatur jalan raya, tempat-tempat pemukiman, pasar, rumah sakit dan lain-lain diadakan secara bertahap. Untuk memenuhi perlengkapan ini diperlukan tenaga dan bahan-bahan. Tenaga berdatangan dari berbagai penjuru. Perlengkapan untuk bahan-bahan bangunan banyak yang didatangkan dari kota-kota kecil dan desa, seperti berjenis-jenis kayu, pasir dan kerikil. Terjadilah arus barang/perdagangan dari kota kecil ataupun desa ke Kota Samarinda.

Karena perubahan status juga membawa dampak lain yaitu pertambahan penduduk, maka dituntut pemenuhan kebutuhan di antaranya yang menyangkut pangan dan papan. Untuk keperluan ini kota-kota kecil/desa berperan untuk memenuhinya. Semakin ramai kegiatan ekonomi kota-kota kecil ataupun desa, semakin ramai pula hubungan dengan kota. Selanjutnya, berda-

sarkan Undang-undang No. 25 tahun 1959, Samarinda diubah statusnya menjadi Kotamadya Samarinda. Jadi pada tahun 1960 ibukota Samarinda menjadi pusat pemerintahan Propinsi Kalimantan Timur dan pusat pemerintahan Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda.

4.6 Pasar dan Lain-lain

Pusat-pusat kegiatan ekonomi kota, yang pada umumnya terdiri atas pasar, pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan, pelabuhan bongkar-muat barang, pergudangan, perbankan dan lain-lain merupakan barometer kemajuan perekonomian di tempat itu. Secara periodesasi, diuraikan keadaan pusat-pusat kegiatan ekonomi itu mulai tahun 1946 hingga tahun 1979.

Pada saat Samarinda ditetapkan sebagai ibukota keresidenan, yaitu sekitar tahun 1946, pasar yang ada hanya satu yaitu "Pasar Pagi". Bangunan pasar ini terbuat dari kayu atau berupa bangsal beralaskan kayu/papan ulin disusun rata dengan tanah dan dibuat bersekat-sekat atau berpetak-petak. Di tempat ini dijual bermacam-macam sayur-sayuran, buah-buahan, beras dan lain-lain kebutuhan. Letaknya di kiri dan kanan anak sungai yang bermuara di Sungai Mahakam. Lebar sungai ini hanya berkisar antara tiga sampai empat meter. Menurut informasi, pedagang yang berjualan di pasar ini tidak begitu banyak, hanya sekitar 50 orang. Di bagian pantai Sungai Mahakam ada pula bangsal yang membujur sungai. Di tempat itu dijual berjenis-jenis ikan, pada umumnya ikan sungai. Pedagang yang berjualan di pasar ini pun tidak banyak, hanya berkisar antara 15 – 20 orang. Pada posisi tegak lurus pasar ikan, ada pula bangsal untuk berjualan daging sapi dan ayam masih hidup. Pedagang yang berjualan di pasar ini hanya sekitar 10 orang. Untuk sayur-sayuran, buah-buahan, beras dan lain-lain kebutuhan, kebanyakan dijual oleh orang Banjar dan Bugis serta Jawa, sedangkan yang berjualan ikan dan daging sapi kebanyakan juga orang Banjar.

Pada sekitar tahun 1947–1950-an perkembangan kota meluas ke arah hilir Sungai Mahakam. Perluasan ini disebabkan ka-

rena pelabuhan dan pertokoan, sehingga muncullah perkampungan baru bernama Karang Mumus dan Sungai Dama. Nama Sungai Dama diambil dari nama anak Sungai Mahakam yang mengalir di situ, dan Sungai Dama lazim juga disebut Sungai Karang Mumus. Pada sekitar tahun 1947-an itu berdirilah suatu pasar yang keadaannya lebih kecil dari Pasar Pagi, yakni "Pasar Sungai Dama" untuk menampung konsumen penduduk Kampung Karang Mumus, dan Kampung Sungai Dama dan Kampung Pelabuhan. Pasar Sungai Dama ini letaknya memanjang di sepanjang Sungai Dama dengan luas sekitar 100 – 150 meter. Barang-barang yang dijual adalah berjenis-jenis ikan, sayur-sayuran, buah-buahan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Pada ± tahun 1949 Pasar Sungai Dama ini mengalami perluasan ke arah daratan dari tepi sungai dan menyeberang jalan raya. Barang-barang yang diperjualbelikan juga berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan sembilan bahan pokok lainnya.

Jarak antara Pasar Sungai Dama dan Pasar Pagi sekitar tiga sampai empat kilometer. Kedua pasar ini makin lama makin ramai mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Keadaan ini membuka pikiran baru bagi pejabat kota untuk membuka kawasan pasar baru, meskipun realisasinya baru tahun 1970-an. Kawasan pasar baru ini adalah kompleks Pasar Segiri. Pasar Segiri ini diperuntukkan bagi para pedagang dari Pasar Pagi yang terkena peremajaan di samping juga untuk membuka peluang-peluang baru bagi pedagang. Pasar Segiri ini serta-merta berkembang pesat, antara lain disebabkan oleh adanya perluasan kota yang memang mengarah ke daerah daratan. Kenyataannya sekarang ini kedudukan Pasar Segiri terletak di tengah-tengah kota.

Sementara itu Pasar Pagi dan Pasar Sungai Dama tetap berfungsi dan ramai. Jarak antara Pasar Pagi dan Pasar Segiri sekitar dua sampai tiga kilometer, sedangkan antara Pasar Pagi dan Pasar Sungai Dama sekitar empat sampai lima kilometer. Di Pasar Segiri dijual berbagai macam keperluan sehari-hari. Agaknya pasar ini lebih besar dari pada Pasar Pagi dan Pasar Sungai

Dama. Berbagai macam suku bangsa berdagang di pasar ini dan yang terbanyak adalah Jawa, kemudian Banjar dan Bugis. Menurut pengamatan penulis, sekarang ini jumlah pengunjung Pasar Segiri setiap hari rata-rata tidak kurang dari 2000 – 3000 orang. Kunjungan yang terbanyak adalah hari Minggu dan hari-hari besar serta pada awal bulan.

Perluasan kota semakin hari semakin berkembang. Dalam Pelita II dan III dibangun pasar-pasar inpres di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang. Pasar-pasar inpres ini sekarang berfungsi dengan baik dan sangat membantu sekali penduduk di sekitarnya. Hingga akhir Pelita II dan Pelita III di Samarinda ada enam pasar, yakni Pasar Pagi, Pasar Sungai Dama, Pasar Segiri, Pasar Inpres Samarinda Ulu, Pasar Samarinda Ilir dan Pasar Samarinda Seberang. Barang-barang yang diperjualbelikan kebanyakan hasil dari kota-kota kecil ataupun desa-desa di sekitar Samarinda.

4.7 *Pertokoan*

Pertokoan di sini dimaksudkan sebagai tempat berjualan tetap dan sekaligus sebagai tempat tinggal. Barang-barang yang diperjualbelikan berupa barang-barang sandang seperti kain-kain, pakaian-pakaian jadi, sepatu, alat-alat rumah tangga, pecah-belah, kaca, bahan-bahan dan alat-alat bangunan, makanan dalam kaleng, bermacam-macam jenis biji-bijian kering, rempah-rempah kering, barang-barang kelontong, jenis dan barang-barang kebutuhan lainnya.

Di kawasan pertokoan ini terdapat pula kegiatan perkantoran yang mengurus ekspedisi muat/bongkar barang antarpulau dan ke luar negeri. Di samping itu terdapat juga warung-warung kopi yang diselenggarakan oleh orang-orang Cina dengan sebutan "helan", tukang-tukang jahit, tukang pangkas rambut, tukang emas/pembuat perhiasan, tukang gigi (pembuat gigi palsu), dan restoran-restoran. Hampir 100% kegiatan dan pemilihannya berada di tangan orang-orang Cina sehingga kawasan ini sekaligus merupakan tempat tinggal orang-orang Cina.

Kawasan pertokoan ini pada sekitar tahun 1945-an sampai tahun 1950-an berlokasi di sepanjang jalan pelabuhan yang sekarang bernama Jalan Jos Sudarso berderet di kiri dan kanan jalan sepanjang kurang-lebih 500 – 800 meter. Pada umumnya toko-toko ini dibuat dari kayu dengan lebar berkisar antara empat sampai enam meter, dan di bagian belakang mereka penggunaan sebagai tempat tinggal. Pada saat itu sistem rumah susun atau bertingkat belum ada. Setelah tahun 1960-an, sistem rumah susun/bertingkat baru mulai bermunculan. Pada tahun 1958-an atau memasuki tahun 1960-an, terutama setelah kawasan pertokoan Samarinda terbakar, tepatnya pada tanggal 2 April 1958, barulah ada perluasan kawasan pertokoan ini yaitu memanjang di kiri dan kanan Jalan Panglima Batur. Pada dekade ini toko-toko ada yang dibuat bertingkat dua dan sudah dianjurkan untuk membuat rumah dari batu/plesteran untuk menghindari bahaya kebakaran.

Sebagaimana dikatakan di atas, kegiatan pemerintah sejak tahun 1960-an di Kota Samarinda semakin ramai dan diikuti pula oleh kegiatan perekonomian. Samarinda sebagai ibukota propinsi dan ibukota kotamadya semakin diperlengkapi perangkat pemerintahannya. Penduduk pun semakin bertambah. Di sektor ekonomi, kegiatan semakin melaju dan lebih istimewa lagi setelah hutan atau biasa disebut "emas hijau" menjadi sektor yang menonjol di samping minyak bumi pada dekade tahun 1967-an ke atas. Volume uang demikian besarnya beredar di kalangan rakyat sehingga banyak kebutuhan yang dapat mereka jangkau. Di sana-sini terjadi investasi-investasi; di antaranya pembuatan toko dan peningkatan volume barang-barang kebutuhan yang masuk ke Kota Samarinda.

Ketika kegiatan di bidang perkayuan mencapai puncaknya, Kota Samarinda benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi dan peredaran uang. Samarinda menjadi pangkalan ekspor kayu-kayu dolken dan pusat berbagai macam barang kebutuhan baik untuk konsumsi penduduk maupun alat-alat untuk mengeksploitasi kayu. Pada saat ini kawasan pertokoan berkembang se-

perti cendawan di musim hujan. Barang-barang yang dijual berlipat ganda pertambahannya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kawasan pertokoan serta-merta meluas ke Jalan Panglima Batur dan Jalan Mulawarman dan ditambah dengan kompleks pertokoan di THG (Taman Hiburan Gora) dan Komplek Pinang Babaris serta jalan-jalan yang menghubungkannya.

Dalam tahun 1980-an pertambahan penduduk di Kota Samarinda mencapai sekitar 6–7% setahun. Hal ini disebabkan oleh munculnya pabrik-pabrik *plywood*, tambang-tambang batu bara, pembukaan lahan-lahan pertanian dan perkebunan serta pabrik pupuk dan LNG di Bontang. Keadaan ini mendorong perluasan kawasan pertokoan/perdagangan di sepanjang Jalan Diponegoro, Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan KH. Abdul Hasan, Jalan Agus Salim dan Jalan Imam Bonjol. Tetapi 90% lebih kawasan-kawasan pertokoan yang baru ini didominasi oleh orang Cina.

Di bawah ini dikutipkan nilai ekspor dan impor Kalimantan Timur sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1980 yang menjadi pendorong besar bagi perkembangan dan perluasan kawasan pertokoan dan pusat-pusat/kegiatan perdagangan lainnya di Kota Samarinda sebagai ibukota propinsi.

4.8 Pelabuhan dan Pergudangan

Letak Pelabuhan Samarinda sejak didirikannya pada sekitar tahun 1930-an hingga sekarang tidak mengalami perubahan. Pelabuhan ini terletak di tepi Sungai Mahakam dengan jarak 60 km atau 37 mil laut dari ambang luar Muara Pegah. Semula pelabuhan ini tidak begitu luas, panjangnya kurang-lebih 50 meter dan lebarnya sekitar 6–8 meter. Tiang dan lantainya terbuat dari kayu ulin. Gudang di pelabuhan ini panjangnya sama dengan panjang jembatan dan lebarnya sekitar 10 meter. Semua barang yang baru datang dan yang akan dikirim ke luar Pelabuhan Samarinda digudangkan terlebih dulu. Fasilitas, kualitas dan kuantitas pelabuhan ini kemudian diadakan penambahan,

perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan fungsinya sebagai pelabuhan bongkar-muat yang terbuka untuk perdagangan dalam dan luar negeri. Puncak dari kegiatan ini adalah antara tahun 1979 – 1984.

Karena data dan informasi mengenai Pelabuhan Samarinda untuk tahun sebelum 1979 sangat terbatas, maka sekedar untuk mendapatkan gambaran tentang pelabuhan itu diuraikan keadaan pada tahun 1979 – 1984 sebagaimana yang dikemukakan dalam buku *Selayang Pandang Pelabuhan Samarinda 1979 – 1984* yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Pelabuhan IV Cabang Samarinda. Pada tahun-tahun tersebut kawasan Pelabuhan Samarinda berada di sepanjang tepian Sungai Mahakam atau secara astronomi terletak antara $0^{\circ}32'20''$ LS sampai dengan $0^{\circ}32'00''$ LS dan antara $117^{\circ}61'20''$ BT sampai dengan $117^{\circ}09'00''$ BT. Wilayah *hinterland*-nya seluas 91.027 km^2 , meliputi Kotamadya Samarinda dan Kabupaten Kutai. Aktivitasnya meliputi pelayaran lokal, antarpulau, dan antarsamudra. Peta yang digunakan adalah Peta Hidrografic Angkatan Laut nomor 159. Kecepatan arus pada waktu air pasang mencapai satu sampai dua mil per jam dan pada waktu air surut tiga sampai empat mil per jam. Kedalaman di depan dermaga rata-rata sembilan meter dan di sekitar pelabuhan 15 meter. Kapal yang berukuran 6.000 DNT dengan draft 6,8 meter dapat masuk ke pelabuhan ini.

Fasilitas yang ada di Pelabuhan Samarinda antara lain ialah dermaga beton untuk Samudra $150 \times 12,5$ meter, Nusantara $100 \times 12,5$ meter dan lokal $150 \times 12,5$ meter, dua buah gudang, yaitu gudang 101 dengan ukuran 80×20 meter dan gudang 102 dengan ukuran 80×20 meter, lapangan penumpukan seluas 7.700 meter persegi, *forklif* baru kapasitas tiga ton sebanyak empat buah dan lima ton sebanyak empat buah, mobil *cerene* berkapasitas 15 ton sebanyak satu buah, dan dua unit pemadam kebakaran, satu unit untuk di laut dan satu unit untuk di darat, kapal pandu sebanyak enam buah, pandu sebanyak 16 yaitu 12 pandu laut dan 4 pandu bandar, dan bermacam-macam audio telekomunikasi, serta 890 orang buruh pelabuhan.

Tabel 10. Nilai Ekspor dan Impor Kalimantan Timur (\$ US)

No.	Tahun	E k s p o r			I m p o r
		Migas	non-Migas	Jumlah	
1.	1972	—	101.658.708,76	101.758.708,76	1.453.346,60
2.	1973	—	270.322.659,58	270.322.659,58	838.386,89
3.	1974	—	356.514.196,54	356.514.196,54	945.165,11
4.	1975	—	352.596.186,56	352.596.186,56	510.737,32
5.	1976	—	389.397.186,74	389.397.186,74	865.842,19
6.	1977	—	474.661.554,56	474.661.554,56	7.700.240,17
7.	1978	—	508.658,969,31	508.658,969,31	121.637.150,20
8.	1969	3.496.675.910,66	783.885.868,44	4.281.561.779,10	205.039.702,08
9.	1980	4.468.219.474,19	561.557.584,70	5.029.777.058,89	347.164.587,83

Sumber: Kantor Perdagangan Propinsi Kalimantan Timur - Samarinda.

Sebagai gambaran mengenai kunjungan kapal-kapal di Pelabuhan Samarinda dari tahun 1979 sampai dengan 1984 dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Kunjungan Kapal-kapal di Pelabuhan Samarinda Tahun 1979 – 1984

No.	Tahun	Kapal	Rata-rata per bulan	GRT	Rata-rata per bulan
1.	1979	4.850	404	4.971.086	414.257
2.	1980	4.815	401	3.002.836	250.236
3.	1981	4.787	398	2.977.870	248.155
4.	1982	4.485	373	1.956.579	163.048
5.	1983	4.530	377	3.164.662	263.721
6.	1984	4.237	353	3.322.935	276.911

Sumber: Kantor Perusahaan Umum Pelabuhan IV Cabang Samarinda, Agustus 1985.

Dari data tersebut dapat kita ketahui terjadinya penurunan jumlah kapal yang masuk mulai tahun 1979 – 1984. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kebijaksanaan pemerintah, yaitu dilarangnya penebangan kayu oleh rakyat secara non-mekanis ("Banjir Kap"), yang kemudian disusul pula dengan kebijaksanaan pemerintah lainnya yakni tentang pembatasan ekspor kayu dolken. Dengan kebijaksanaan pemerintah tersebut maka hanya kayu lapis atau kayu batangan yang telah diolah yang boleh diekspor.

Untuk mengamati lalu-lintas barang (tanpa logs) di Pelabuhan Samarinda pada tahun 1979 – 1984, dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Lalu-lintas Barang (tanpa logs) di Pelabuhan Samarinda, 1979 – 1984

No.	Tahun	M a s u k		K e l u a r		Jumlah	Rata-rata /bulan
		Antarpulau	Impor	Antarpulau	Ekspor		
1.	1979	322.134	61.503	452.347	4.256.221	5.092.250	424.354
2.	1980	403.301	95.395	699.139	2.148.290	3.346.105	278.842
3.	1981	421.173	101.959	858.437	1.005.611	2.387.180	198.931
4.	1982	533.556	120.721	745.436	669.608	2.069.320	172.443
5.	1983	524.961	89.348	951.267	1.066.779	2.632.355	219.362
6.	1984	461.331	38.825	670.033	1.025.479	2.195.668	182.972

Sumber: Kantor Cabang Perusahaan Umum Pelabuhan IV Cabang Samarinda, Agustus 1985.

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa setelah tahun 1979 kegiatan ekspor menurun drastis, tetapi sebaliknya kegiatan perdagangan antarpulau menunjukkan kegiatan menaik baik untuk barang-barang masuk maupun barang-barang keluar. Keadaan sebagaimana tergambar di atas disebabkan pembatasan penebangan hutan dan ekspor kayu gelondongan.

Jumlah gudang yang tercatat di Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Koperasi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Jumlah Gudang di Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Koperasi Kalimantan Timur Tahun 1969 – 1977

No.	Tahun	Jumlah gudang	Luas (m ²)	Keterangan
1.	1969	127	36.528,02	—
2.	1970	142	—	Tidak ada data
3.	1971	139	—	—
4.	1972	167	—	—
5.	1973	190	37.226,24	—
6.	1974	207	41.678,24	—
7.	1975	214	45.112,34	—
8.	1976	212	46.209,10	Ada 2 gudang terbakar tetapi ada perluasan
9.	1977	220	49.700,80	—

Sumber: Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Koperasi Kalimantan Timur.

Semua pergudangan adalah milik swasta dan lokasinya tidak dalam satu tempat, tetapi beberapa tempat sesuai dengan jenis barang yang digudangkan. Untuk barang-barang kelontong, bahan bangunan, bahan pakaian/kain-kain, gula, tepung, barang-

barang makanan (kecuali ikan kering), perabot rumah tangga, mesin-mesin/onderdil dan sebagainya letaknya di sekitar lokasi pertokoan, sedangkan untuk barang-barang hasil hutan seperti rotan, damar, getah jelutung, buah tengkawang, karet dan ikan kering lokasi pergudangannya di luar kota arah ke hulu Sungai Mahakam, sekitar 10 – 12 km dari pelabuhan. Demikian juga halnya dengan gudang hasil-hasil industri perkayuan, letaknya dalam satu unit dengan pabrik pengolahan itu sendiri. Lokasi lainnya sebagian besar berada pada arah ke hilir Sungai Mahakam, sekitar 15 km dari pelabuhan.

4.9 Perbankan

Sekitar tahun 1930 di Kota Samarinda terdapat sebuah bank yaitu *Volksceidiet Bank*. Pada sekitar tahun 1946 bank tersebut berubah namanya menjadi Bank Tani dan Nelayan dan sekarang bernama Bank Rakyat Indonesia. Sebelum memasuki tahun-tahun Pelita pertama, jadi sebelum tahun 1969, di Kota Samarinda terdapat enam buah bank, yakni Bank Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan PT. Bank Kalimantan.

Pada tahun-tahun Pelita pertama, dunia perbankan mengalami penambahan. Kalau pada tahun-tahun sebelum memasuki Pelita pertama di Kota Samarinda terdapat enam bank dengan dana yang beredar sekitar setengah milyar rupiah, maka pada tahun-tahun Pelita I jumlah bank yang beroperasi ada delapan buah, yaitu Bank Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Kalimantan, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Bumi Daya dan Bank Ekspor Impor Indonesia dengan dana yang beredar sekitar 6,6 milyar rupiah.

Dalam tahun-tahun Pelita II di Kota Samarinda terdapat delapan bank yang beroperasi. Sebenarnya ada sembilan bank yang beroperasi tetapi terjadi *merger* antara PT Bank Kalimantan dan PT Bank Pacific sehingga Bank Kalimantan tidak mun-

cul lagi dan diganti oleh Bank Pacific dengan dana yang beredar sekitar 25,3 milyar rupiah. Suatu peningkatan yang sangat besar. Keadaan perbankan ini semakin meningkat setelah memasuki tahun-tahun Pelita III. Lokasi bank-bank menyebar hampir di setiap jantung kegiatan/keramaian kota.

4.10 Terminal

Di daerah Kotamadya Samarinda terdapat dua macam terminal, yaitu terminal untuk kendaraan air (sungai) dan terminal untuk kendaraan darat (mobil). Terminal kendaraan air pada umumnya lokasinya bertepatan dengan pasar. Jadi sebenarnya terminal untuk kendaraan air ini tidak lain adalah "dermaga". Dalam tulisan ini dermaga diuraikan sebagai terminal karena kendaraan sungai merupakan kendaraan utama.

Terminal kendaraan air yang kita ketahui sejak tahun 1945 itu adalah terminal kendaraan air "Pasar Pagi" dan "Samarinda Seberang". Pada tahun 1960 – 1970-an jumlah terminal kendaraan air/sungai mengalami peningkatan, antara lain terminal di Jalan Cermai, Terminal/Tambatan di Kampung HBS, Terminal Tambatan di Jembatan Satu dan Terminal di Jalan Irian. Pada tahun 1970-an ke atas diadakan penertiban, terutama dalam kaitannya dengan peremajaan kota di bagian tepi-tepi sungai. Terminal di Jalan Irian, di Jembatan Satu, dan di Kampung HBS dihapuskan. Hingga sekarang terminal kendaraan air yang masih berfungsi ialah di Pasar Pagi untuk berbagai jurusan, di Samarinda Seberang dan di Jalan Cermai.

Untuk terminal angkutan darat pertambahannya disesuaikan dengan perluasan kota dan jaringan jalan. Pada tahun 1945-an terminal kendaraan darat hanya ada satu yaitu di Pasar Pagi. Baru pada tahun 1970-an ke atas ada penambahan beberapa terminal, antara lain terminal "Segiri", terminal "Pinang Babaris", terminal "Sungai Kunjung" dan terminal "Samarinda Seberang". Terminal Pasar Pagi merupakan tempat bongkar muat penumpang dari segala jurusan. Jurusan B untuk jurusan kota, jurusan

C untuk jurusan Segiri dan sekitarnya, dan jurusan A untuk jurusan Karangasam & Sungai Kunjang dan sekitarnya. Terminal Pinang Babaris untuk kendaraan-kendaraan yang ada hubungannya dengan kegiatan perbelanjaan di pusat pertokoan Pinang Babaris. Terminal Sungai Kunjang dan terminal Segiri sebenarnya dimaksudkan untuk bongkar-muat penumpang jurusan C dan jurusan A, tetapi sayangnya terminal ini tidak begitu berfungsi karena kendaraan taksi itu tidak mau berhenti di terminal itu. Mereka lebih suka berkeliling terus untuk mencari penumpang. Terminal Samarinda Seberang digunakan untuk bongkar-muat penumpang dari dan ke luar kota, seperti ke Balikpapan, Tenggarong, Loa Janan dan lain-lain jurusan ke luar kota. Terminal-terminal tersebut adalah yang teramai dan terbanyak dikunjungi penumpang.

4.11 Transportasi dan Komunikasi

Sektor perhubungan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan, antara lain sebagai penunjang dalam upaya peningkatan produksi dan jasa, di samping itu berperan pula dalam hal memperlancar arus orang dan barang. Peran lainnya yang cukup penting artinya dan yang dapat dilakukan oleh sektor perhubungan juga ikut-serta menunjang usaha pembinaan kesatuan bangsa dan negara. Pembangunan sektor perhubungan di wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda pada umumnya bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan yang se-rasi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, serta memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap daerah yang agak jauh dan pusat pelayanan sosial maupun ekonomi serta administrasi pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Samarinda dalam kedudukannya tidak saja sebagai ibukota daerah tingkat dua kotamadya, akan tetapi juga sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Timur, akan menjadi pusat jaringan transportasi serta komunikasi seluruh wilayah propinsi. Hingga akhir tahun 1978, jaringan lalu lintas darat yang telah dikembangkan tidak saja menghubungkan pusat-pusat pemukiman penduduk di da-

lam kota, akan tetapi juga telah diperluas hingga dapat menghubungkan antarkota daerah tingkat dua kotamadya seluruh Propinsi Kalimantan Timur dengan Samarinda sebagai titik pusatnya.

Pembangunan dan perkembangan sektor perhubungan di wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda terbagi ke dalam dua sub sektor, yakni "Lalu-lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR)" dan "Lalu-lintas Angkutan Sungai, Danau dan Ferry (LLASDF)".

4.11.1 Lalu-lintas Angkutan Jalan Raya

Sejak dimulainya Pelita I, perkembangan angkutan jalan raya menunjukkan angka kenaikan yang terus meningkat. Kebijakan pembangunan sub sektor LLAJR ini ditujukan pada terciptanya sistem angkutan jalan raya yang lancar, aman dan tertib. Dengan demikian angkutan jalan raya dapat memenuhi fungsinya sebagai penunjang pembangunan, khususnya untuk mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan pertumbuhan ekonomi di lokasi yang terpencil.

Panjang jalan dalam Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda pada akhir tahun 1979 yang sudah beraspal adalah 130,3 km. Pada tahun 1986 jalan yang beraspal hanya sepanjang 42,8 km. Di samping itu terdapat pula jalan yang belum dikeraskan yakni sepanjang 95,6 km. Seiring dengan pembangunan prasarana angkutan jalan, maka jumlah kendaraan bermotor menunjukkan pertambahan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1975 mobil penumpang hanya berjumlah 834 buah, truk sebanyak 419 buah, bis sebanyak 104 buah dan sepeda motor hanya berjumlah 4.690 buah. Namun empat tahun kemudian, yakni pada akhir tahun 1979, jumlah mobil penumpang sudah sebanyak 1.776 buah, jadi mengalami kenaikan lebih dari 100%. Pada waktu yang sama, jumlah truk adalah sebanyak 1.150 buah (kenaikan lebih dari 250%), bis mengalami kenaikan jumlah sebesar 600% (sejumlah 656 buah), dan sepeda motor mengalami persentasi kenaikan cukup tinggi pula, yakni sebesar hampir 300% (13.147 buah).

Untuk menjaga tertib lalu-lintas, di Kota Samarinda telah dipasang sebanyak 365 buah rambu-rambu jalan, dan empat unit lampu lalu-lintas (*traffic light*). Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang memerlukan jasa angkutan setiap hari, maka lalu lintas orang serta barang perlu pula ditertibkan. Untuk keperluan tersebut, LLAJR telah membangun tujuh buah terminal, yakni terminal Samarinda Seberang, terminal pelabuhan, terminal Handil II, terminal Sungai Kujang, terminal Pasar Pagi, terminal Tenggarong, dan terminal Lapangan Udara Temindung.

4.11.2 Lalu-lintas Angkutan Sungai, Danau dan Ferry (LLASDF)

Dari tujuh kecamatan yang berada di bawah kekuasaan administratif Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda, ada pula beberapa di antaranya yang sangat tergantung pada jasa angkutan sungai sebagai sarana perhubungan yang utama; yang dimaksud ialah Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Sanga-sanga. Dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan lalu lintas sungai, danau dan ferry ini adalah Inspeksi LLASDF. Dewasa ini salah satu urat nadi perhubungan yang cukup penting bagi Kotamadya Samarinda ialah ferry yang menghubungkan Samarinda Kota dengan Samarinda Seberang, Loa Janan, Balikpapan dan Tenggarong. Pelabuhan ferry tersebut terletak di Kampung Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ulu. Keadaan sarana angkutan sungai di Kotamadya Samarinda selama periode 1972, 1976, dan 1979 tergambar pada tabel berikut.

Kalau dipelajari data yang termuat dalam tabel tersebut di atas, ternyata semua jenis angkutan sungai mengalami penurunan jumlah di tahun 1976, dan 1979. Yang terakhir ini terkecuali *speed boat* dan kapal tarik sedikit mengalami kenaikan. Kemungkinan gejala tersebut disebabkan oleh semakin menurunnya peranan angkutan sungai di wilayah Kotamadya Samarinda, karena sedikit demi sedikit sudah dapat diambil alih angkutan

darat, sebagai akibat adanya penambahan prasarana jalan darat. Dalam hal ini angkutan sungai sulit bersaing dengan angkutan darat yang dapat memberikan pelayanan angkutan lebih cepat dengan ongkos yang lebih murah.

Tabel 14. Jumlah Sarana Angkutan Sungai yang Terdaftar pada Inspeksi LLASDF Tahun 1972, 1976, dan 1979

No.	Sarana Angkutan Sungai	Tahun		
		1972	1976	1979
1.	Kapal Motor	213	197	163
2.	Speed Boat	96	61	96
3.	Kapal Tarik	24	14	18
4.	Tongkang	—	—	11
5.	Perahu Motor	52	36	8

Sumber: Zimmermann, 1980

Boom kayu di Kalimantan Timur di awal tahun tujuh-puluhan, mendadak sontak membangunkan Samarinda dari tidur nyenyaknya. Walaupun kedudukan kota ini merupakan salah satu pintu gerbang utama di Kalimantan Timur, di samping Balikpapan dan Tarakan namun selama ini, sesuai dengan kondisi kehidupan perekonomian saat itu, Pelabuhan Samarinda paling banyak hanya dikunjungi empat atau lima buah kapal antar-pulau yang berbobot mati antara 300 sampai dengan 500 ton. Kini setelah komoditi kayu Kalimantan Timur memperoleh pasaran yang sangat laris di pasaran internasional dengan harga yang cukup tinggi, mendadak Pelabuhan Samarinda dikunjungi oleh puluhan kapal samudra setiap hari yang berbobot mati minimal 6.000 ton. Untuk itu Pelabuhan Samarinda harus segera berbenah diri menyesuaikan keadaan dengan persaratan sebuah "pelabuhan samudra".

Pelabuhan Samarinda terletak di tepian Sungai Mahakam dengan jarak dari muara kurang-lebih 37 mil (60 km). Di beberapa tempat terdapat kedalaman air kurang-lebih tiga meter. Dengan demikian, kapal yang berukuran 6.000 Dwt hanya dapat memuat antara 2.000 – 2.500 m³ kayu bundar (*logs*), sedangkan sisanya harus dimuat di pantai laut. Agar kapal-kapal samudra dapat memuat penuh di daerah Pelabuhan Samarinda, diperlukan kedalaman air antara 6,5 sampai 6,8 meter. Oleh karena itu pemerintah pusat kemudian memberi persetujuan untuk segera dilaksanakannya proyek pengerukan agar kapal-kapal samudra dapat langsung memuat logs dengan kapasitas penuh. Hingga akhir bulan Juni 1977 telah tercatat sebanyak 347 buah kapal yang memuat 1.788,796 m³ kayu bundar (*logs*), dengan *draft* antara 6,5 – 7,2 meter. Kegiatan angkutan laut di Pelabuhan Samarinda dapat terlihat pada tabel berikut.

Sebelum tahun 1974, hubungan Samarinda dengan dunia luar melalui jalan udara belum ada. Sekitar tahun limapuluhan, jalur perhubungan udara ini pernah dilakukan oleh pesawat jenis Catalina yang mendarat di Sungai Mahakam. Akan tetapi kegiatan tersebut hanya melayani kegiatan pemerintah saja, jadi bukan untuk penumpang umum. Hal ini tidak berlangsung lama, dan terhenti tanpa diketahui sebabnya. Setelah itu jalur udara hanya dapat dilakukan melalui Lapangan Udara Sepinggang di Balikpapan. Untuk itu penumpang harus berangkat dari Samarinda, menyusur Sungai Mahakam ke Handil II. Dari tempat ini perjalanan menuju Lapangan Udara Sepinggang dilanjutkan melalui jalan darat yang kondisinya sangat buruk, apa lagi kalau turun hujan, penumpang harus turun untuk membantu mendorong mobil yang terperangkap lumpur. Perjalanan dari Samarinda ke Lapangan Udara Sepinggang memakan waktu minimal 6 jam.

Sehubungan dengan kegiatan perekonomian yang semakin meningkat dan angat memerlukan sarana perhubungan dengan mobilitas tinggi, maka Samarinda sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Kalimantan Timur sangat membutuh-

kan sebuah lapangan terbang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah bekerja sama dengan Pertamina yang dalam hal ini diwakili oleh PT Pelita Air Service, telah membangun sebuah lapangan terbang perintis di Desa Temindung, Kecamatan Samarinda Ilir. Lapangan terbang tersebut dibangun dengan konstruksi sederhana, yaitu pasangan lembaran baja di atas sebidang tanah berukuran panjang 790 meter dan lebar 24 meter. Lapangan tersebut diresmikan pemakaiannya oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kardono pada tanggal 24 Juli 1974 dengan nama "Pelabuhan Udara Temindung". Lapangan terbang tersebut terletak pada ketinggian 10–11 meter di atas permukaan laut.

Tabel 15. Kegiatan Angkutan Laut di Pelabuhan Samarinda, Tahun 1967 – 1976

No.	Kegiatan	Tahun			
		1967	1970	1973	1976
1.	Kunjungan Kapal				
	a. Samudra	171	500	859	1.042
	b. Nusantara	186	574	101	50
	c. Lokal	248	647	1.226	2.151
2.	Arus Penumpang				
	a. Penumpang Naik	2.430	6.462	9.530	10.737
	b. Penumpang Turun	1.600	3.670	6.107	6.976
3.	Arus Barang				
	a. Antar Pulau				
	1) Bongkar	4.725	19.242	33.485	15.557
	2) Muat	3.121	9.986	12.235	12.683
	b. Antar Negara				
	1) Ekspor	597.985	1.840.599	4.709.356	4.929.331
	2) Impor	3.895	14.286	37.602	81.988

Sumber: Administrator Pelabuhan Samarinda, 1985

Nama-nama perusahaan penerbangan yang mempergunakan Lapangan Terbang Temindung ini adalah PT Bouraq Air Line, PT Merpati Nusantara Air Line, PT Georgia Pasific Indonesia, PT Avedeco, ATA, MAF, dan IATA. Lapangan terbang tersebut mempunyai daya dukung seberat 8 ton, karena itu pesawat yang dapat mendarat hanyalah sejenis pesawat terbang ringan, seperti Norman Islander, Twin Otter, dan pesawat sejenis itu. Data tentang lalu-lintas udara di Lapangan Terbang Temindung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Kegiatan Lalu-lintas Lapangan Udara Temindung Tahun 1976, 1978, dan 1980.

No.	Kegiatan	1976	1978	1980
1.	Penerbangan	3.149	6.985	5.362
2.	Arus Penumpang			
	– Datang	5.311	10.662	6.683
	– Pergi	5.388	11.151	7.364
3.	Barang (kg)			
	– Bongkar	12.308	104.029,8	4.538
	– Muat	16.686	100.449,2	5.011
4.	Pospaket (kg)			
	– Bongkar	3.058	34.716,8	42.518
	– Muat	4.166	20.282,0	23.237

Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Temindung, 1981.

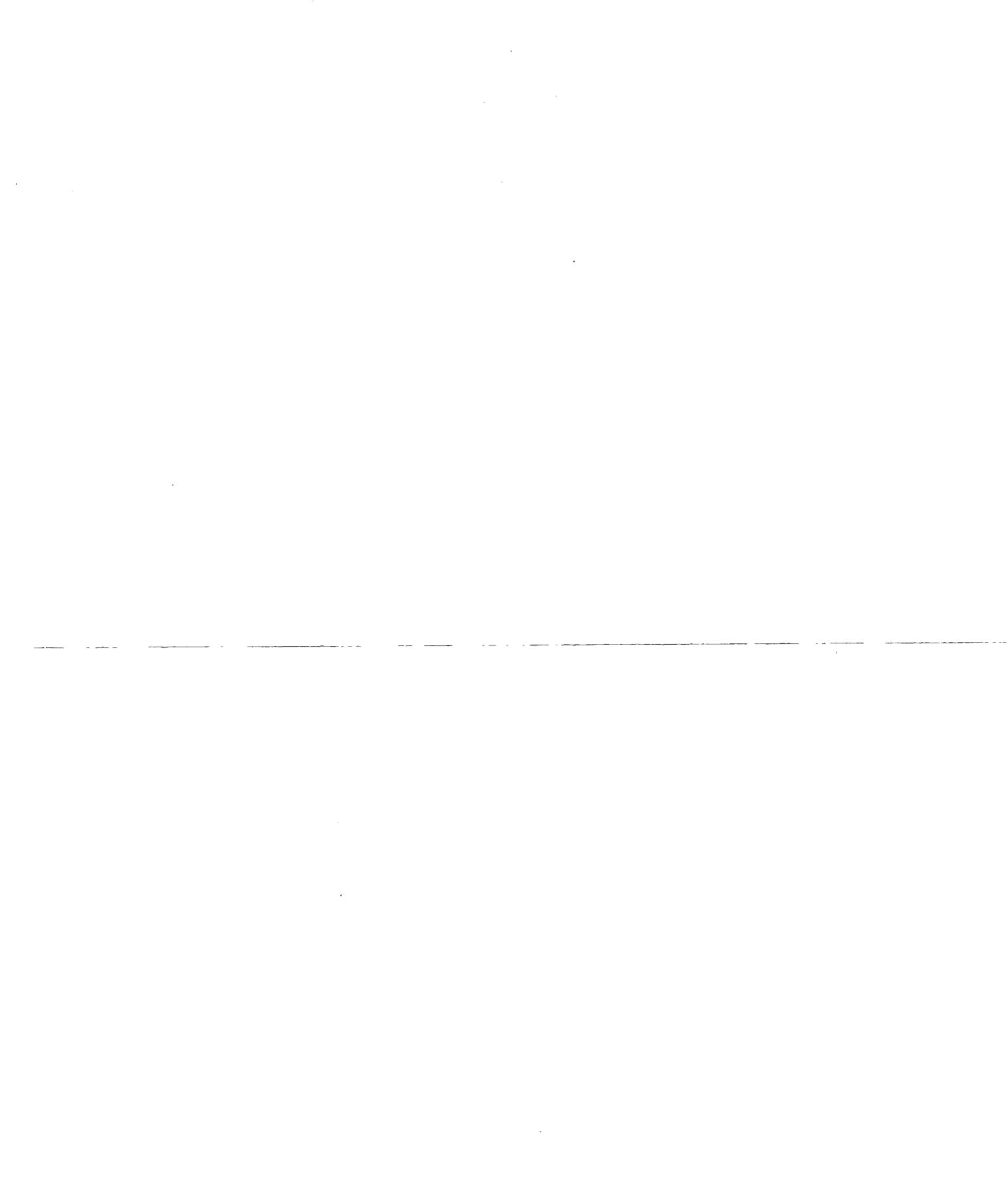
Dalam sektor telekomunikasi dapat dicatat, bahwa dalam tahun 1967, Samarinda hanya memiliki sentral telepon dengan kapasitas sebanyak 600 nomor. Hubungan lokal masih dilakukan dengan mempergunakan sentral telepon sistem baterai lokal dan dengan kondisi yang telah tua. Hubungan internasi-

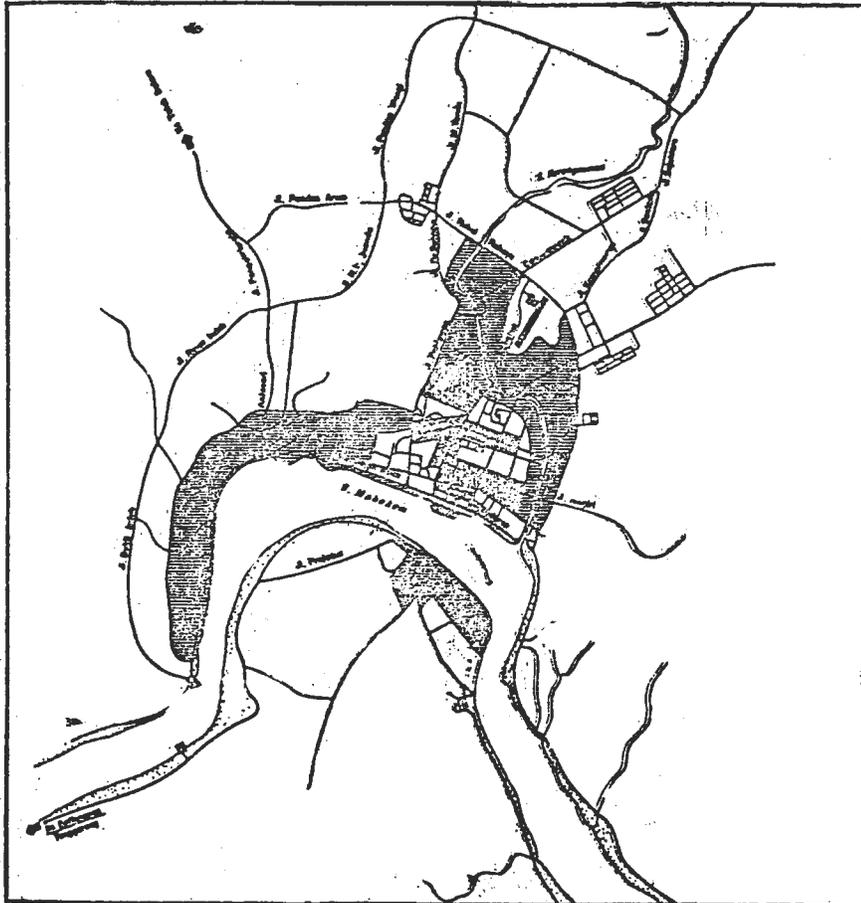
onal antar kota dalam wilayah Propinsi Kalimantan mempergunakan hubungan "radio teleponi".

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian/perdagangan maka permohonan sambungan telepon meningkat pula. Antara tahun 1967 sampai dengan 1977 kenaikan permohonan sambungan telepon rata-rata meningkat. Hal ini berarti bahwa pemakaian jasa telepon pun semakin meningkat pula. Sehubungan dengan itu maka di awal tahun 1970 di Samarinda telah dibangun instalasi telepon semi otomatis dengan kapasitas 960 nomor. Jumlah pelanggan telepon di Samarinda hingga tahun 1979 adalah 3.857 (1976), 4.435 (1978), dan 5.100 (1979). Kegiatan perhubungan melalui telepon internasional pun mengalami kenaikan dengan semakin bertambahnya arus lalu-lintas percakapan internasional.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemakai jasa hubungan interlokal ini, maka sejak tahun 1973 telah dirintis usaha perbaikan melalui proyek VHF/HF. Pada tahun 1975 di Samarinda telah dibangun dua buah stasiun bumi SKSD untuk meningkatkan kualitas hubungan telepon dengan seluruh kota-kota besar di Indonesia dan juga dengan luar negeri. Sejak tahun 1976 di Samarinda telah dibangun pula sentral telepon otomatis dengan kapasitas 300 lin unit. Pembangunan gedung sentral telepon otomatis tersebut selesai pada tahun 1978.

Di bidang jasa telegrap/teleks, sejak tahun 1986 sudah mempergunakan teknik transmisi mutakhir, yakni Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. Sejalan dengan itu maka sejak tanggal 2 Oktober 1976 Kantor Telepon dan Telegrap Samarinda telah ditingkatkan menjadi Kantor Telegrap dan Teleks Samarinda.





KEMAMPUAN FISIK KOTA UNTUK DIKEMBANGKAN SECARA INTENSIF

KETERANGAN

-  : Jalan : Raya
-  : Jalan
-  : Lintasan : Turun
-  : "Sambutan" : Bu
-  : "Sambutan" : Ferry
-  : "Sambutan" : Perikanan
-  : Kawasan : Yang Perlu Diperbaiki
-  : Kawasan : Yang Dapat Dikembangkan Secara Vertikal

DI BAPPENAS SAMARINDA BERKOLABORASI DENGAN
SARAWAK
JABATAN PERENCANAAN



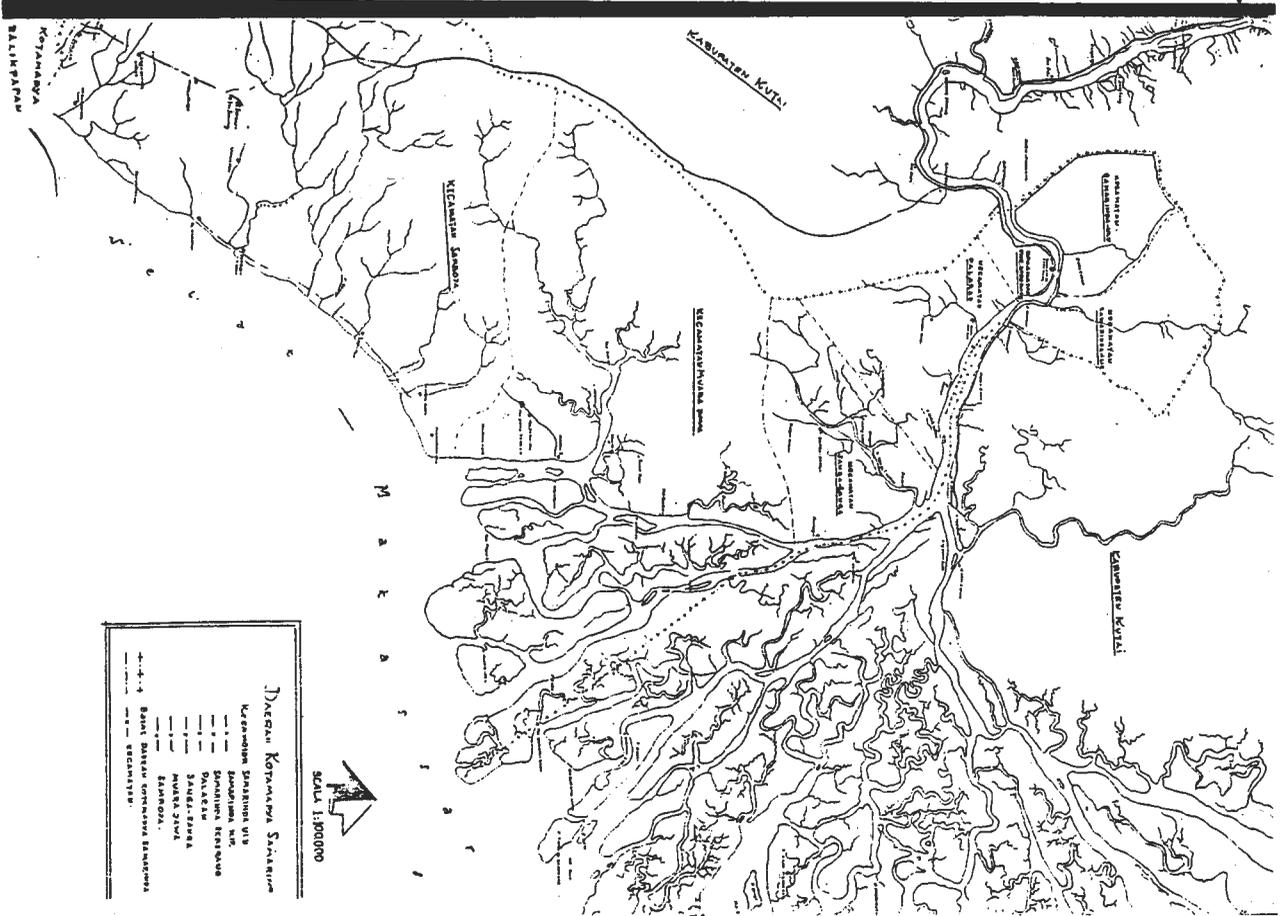
1 : 500 000 1 : 2500

PETA 1: KOTA SAMARINDA

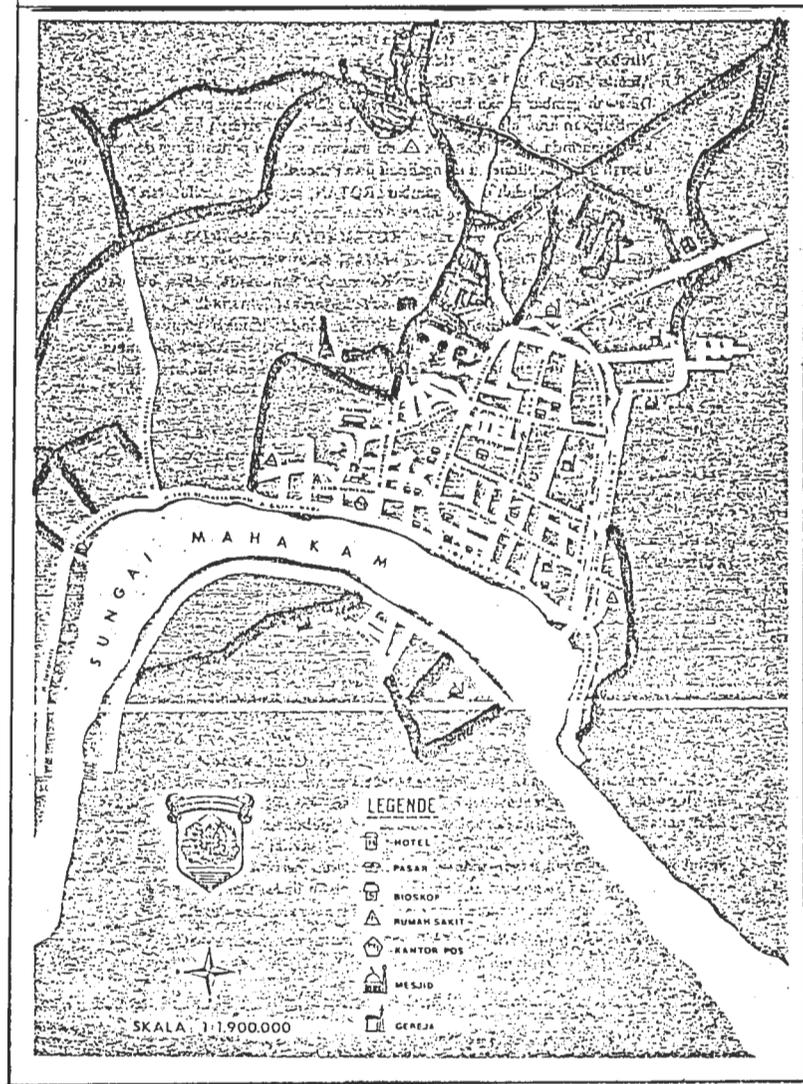


PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SAMARINDA

PETA 2 : PETA DAERAH KOTAMADYA SAMARINDA



PETA 3: PETA JALUR JALAN KOTA SAMARINDA



Keterangan : Jalur Putih, Jalur Jalan Sebelum PELITA
Jalur Hitam, Jalur Jalan Sesudah PELITA

LALU LINTAS BARANG
CARGO HANDLING

Tanpa Logs/*Without Logs*

Tahun Year	Masuk / <i>Inward</i>		Keluar / <i>Outward</i>		Jumlah Total	Rata-2/ <i>Bulan</i> Average/ <i>Month</i>
	Antar Pulau <i>Inter Island</i>	Impor <i>Import</i>	Antar Pulau <i>Inter Island</i>	Expor <i>Export</i>		
1979	322.134	61.503	452.347	4.256.221	5.092.250	424.354
1980	403.301	95.395	699.139	2.148.270	3.346.105	278.842
1981	421.173	101.959	858.437	1.005.611	2.387.180	198.931
1982	533.556	120.721	745.436	669.608	2.069.320	172.443
1983	524.961	89.348	951.267	1.066.779	2.632.355	219.362
1984	461.331	38.825	670.033	1.025.479	2.195.668	182.972

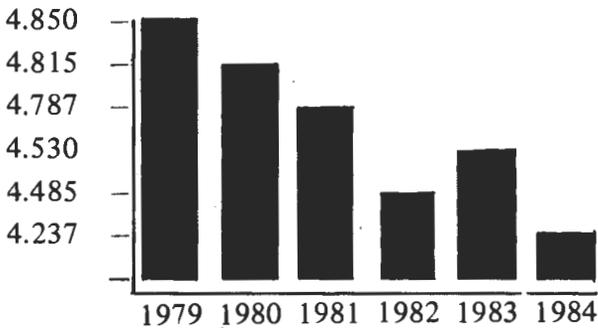
GRAFIC



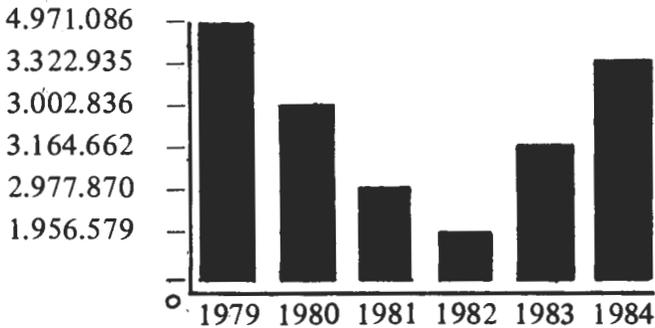
KUNJUNGAN KAPAL
SHIPS CALL

No.	Tahun Year	Kapal Ships	Rata-rata/Bulan Average/Month	G R T	Rata-rata/Bulan Average/Month
1.	1979	4.850	404	4.971.086	414.257
2.	1980	4.815	401	3.002.836	250.236
3.	1981	4.787	398	2.977.870	248.155
4.	1982	4.485	373	1.956.579	163.048
5.	1983	4.530	377	3.164.662	263.721
6.	1984	4.237	253	3.322.935	276.911

SHIPS CALL



G.R.T.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Amin Asli, M. : Pertumbuhan Kerajaan Kutai Kertanegara, Sekripsi Sejarah Sarjana IKIP Malang 1968.
2. Bock Carl : Reis in Oost-Zuid Borneo, van Koetei naar Bandjarmasin, Martinus Nijhoff 's Gravenhage 1905.
3. de Graaf : Geschiedenis van Indonesie, N.V. Uitg. W.V. Hoeve, Den Haag, Bandung 1949.
4. Eisenberger, J. : Kronick Zuidersen Oosteraf-deeling van Borneo, drukkerij Lim Hwat Sing Banjarmasin 1936
5. Gerd R. Zimmermann : East Kalimantan Statistical Guide, TAD Samarinda 1980
6. Hasan Amir KB : Suluh Sejarah Kalimantan, Penerbit Fajar Banjarmasin 1952.
7. Irwin Graham : Nineteenth Century Borneo 's Gravenhage-Martinus Nijhoff, 1955.

8. Knappert S.C. : Beschrijving van het Onderafdeeling Koetei, Martinus Nijhoff, 's Gravenhage 1905.
9. Muhammad Abduh dkk. : Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Sulawesi Selatan, departemen Pendidikan dan kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN 1981/1982.
10. Muhammad Tayib, R. : Silsilah Kerajaan Kutai Kertanegara Tenggarong 1284 H.
11. Mees, C.A. : Kroniek van Koetei, N.V. Uigg v/h C.A. Mees Sanpoort 1935.
12. ----- : Pemerintah Tk. II Kotamadya Samarinda, Kotamadya Samarinda dan Pembangunan, Sido-yoso-Surabaya-1978.
13. ----- : Kotamadya Samarinda Dalam Angka, 1983 Kantor Statistik Kotamadya Samarinda 1984.
14. Perusahaan Umum Pelabuhan IV Cabang Samarinda : Selayang Pandang Pelabuhan Samarinda 1969-1984, Kantor Perusahaan Umum Pelabuhan IV Cabang Samarinda, 1985.
15. Pemda Tk. II Kutai : Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai, Tenggarong, 1975.
16. Panitia Seminar : Samarinda Dengan Perkembangan Dakwah Islam Samarinda 1981.
17. Weddik A.L. : Beknopt Overzicht van het Rijk van Koetei, Indische Archief 1ste jaargang deel 1, 1849

B. Majalah

1. Kantor Daerah Dirjen Kebudayaan : "KUDUNGGGA" No. I – IV
2. Kementerian Penerangan : " PROPINSI KALIMANTAN TIMUR" Jakarta, 1953 No. 8

C. Arsip

1. Staatsblad van Nederlandsch–Indie No. 7:1896.
2. Staatsblad van Nederlandsch–Indie No. 194:1903.

D. Koran

1. Masyarakat Borneo : 1950 No. 107–111
2. Rambah ti Rata : 1950 No. 5

E. Peta

1. Samarinda tahun 1896.
2. Situasi Wilayah Kerajaan Kutai Kertanegara.
3. Peta Daerah Kotamadya Samarinda.
4. Jalur Jalan Kotamadya Samarinda.

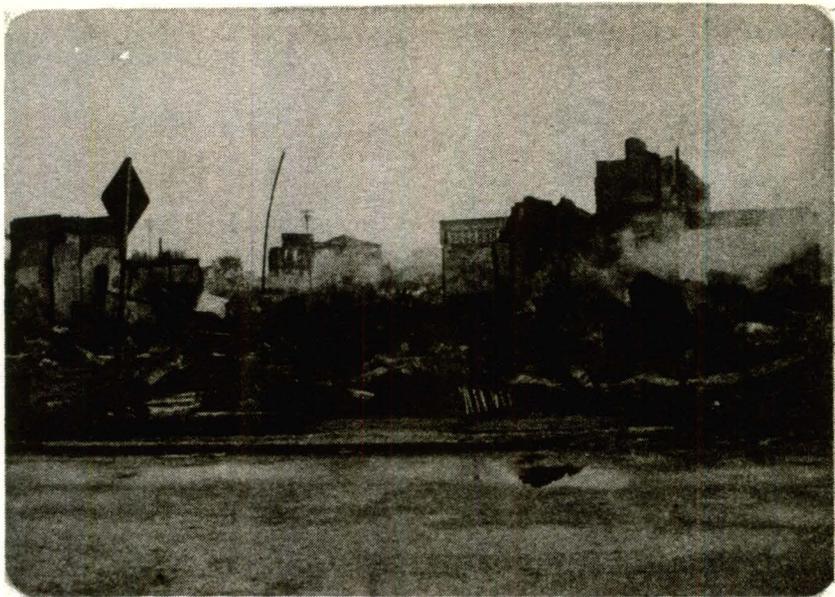




Kantor Gubernur KDH Tk. I Propinsi Kalimantan Timur (yang baru), Gajah Mada-Samarinda-Kota



Kantor Gubernur KDH Tk. I Propinsi Kalimantan Timur di Jalan Awang Long



Kebakaran di pusat pertokoan Jalan Panglima Batur Samarinda, pada tanggal 31 Oktober 1985



Polisi berpatroli di daerah kebakaran



Kampung Karang Mumus (Karamumus), kampung tua di Samarinda Ilir



Kompleks Wanita Tuna Susila di Air Biru dekat jalan ke Sempaja, Samarinda

PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Rumah Sakit Umum Samarinda yang baru di Segiri Samarinda Ulu, dibangun pada PELITA II - III



Rumah Sakit Umum Samarinda lama, dibangun pada tahun 1933

